

Pengaruh Upah, Bantuan Sosial dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Zania Ulfah Satari
8105132170



Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

**INFLUENCE OF WAGES, SOCIAL ASSISTANCE AND
LEVEL OF EDUCATION ON POVERTY IN THE PROVINCE
OF CENTRAL JAVA IN 2011-2015**

Zania Ulfah Satari
8105132170



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment
at The Faculty of Economic, State University of Jakarta**

**STUDY PROGRAM EDUCATION OF ECONOMICS
FAKULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2017**

ABSTRAK

ZANIA ULFAH SATARI. *Pengaruh Upah, Bantuan Sosial, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015*. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 2011-2015 dan data *cross section* 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan *ex post facto* dan menggunakan metode *fixed effect*. Data yang disajikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel upah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y), variabel bantuan sosial (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y), dan variabel tingkat pendidikan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y).

Kata Kunci : Upah, Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan, Kemiskinan

ABSTRAK

ZANIA ULFAH SATARI. *The Effect of Wages, Social Assistance, and Level of Education Against Poverty in Central Java Province 2011-2015*. Economic Education Cooperative. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2017.

This reserach aims to analyze the influence of wages, social assistance, and the level of education to poverty in the province of Central Java. The research data used is time series data from 2011-2015 and cross section 35 districts / cities in Central Java Province with ex post facto approach and using fixed effect method. The data presented are obtained from the Central Bureau of Statistics of Central Java Province. Data analysis technique used in this research is panel data regression analysis. The result of the research shows that wage variable (X1) has a negative and significant effect on poverty (Y), social assistance variable (X2) has positive and significant effect on poverty (Y), and education level (X3) has negative and significant effect to poverty (Y).






Keywords: *Wages, Social Assistance, Education Level, Poverty*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, ES., M. Bus
NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Suparno, SPd, MPd</u> NIP. 197908282014041001	Ketua Penguji		<u>3 Januari 2018</u>
<u>Herlith, S.Sos, MEc, Dev</u> NIP. 198401062014042002	Sekretaris		<u>9 Januari 2018</u>
<u>Dr. Karuniana Dianta AS, SIP, ME</u> NIP. 198009242008121002	Penguji Ahli		<u>8 Januari 2018</u>
<u>Dr. Sri Indah Nikensari, SE, MSE</u> NIP. 196208091990032001	Pembimbing I		<u>4 Januari 2018</u>
<u>Dicky Ironto, SE, ME</u> NIP. 197106122001121001	Pembimbing II		<u>4 Januari 2018</u>

Tanggal lulus : 19 Desember 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Negeri Jakarta.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 19 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



Zania Ulfah Satari

NIM. 8105132170

MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum

kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri

(Al-rád 13 : 11)

Skripsi ini terbentuk tidak lepas dari dukungan orang-orang disekeliling saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih khususnya kepada orang tua dan kerabat yang senantiasa memberikan doá dan dukungan baik moril maupun materil. Maaf jika skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian.

Pesan saya :

“Kegagalan bukan akhir dari segalanya, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda”.

“Teruslah berdoa dan berusaha”.

-Zania Ulfah Satari-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun proposal ini. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Dalam menyusun proposal ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
3. Dr.Ari Saptono, SE, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Muhammad Yasser Arafat, SE.Akt, MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
5. Suparno,S.Pd,M.Pd., selaku Kordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi;
6. Dr.Sri Indah Nikensari, M.SE., selaku Dosen Pembimbing I;
7. Dicky Iranto, S.E, M.E., selaku Dosen Pembimbing II;
8. Suparno, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua Penguji;

9. Dr. Karuniana Dianta A.S, S.IP, M.E., selaku Penguji Ahli;
10. Herlith, S.Sos, M.Ec, Dev, selaku Sekretaris Penguji;
11. Kedua Orang tua dan adik saya yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya dalam menyusun proposal penelitian ini;
12. Bima, Putri, Nurma, dan Khairil yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyusun proposal penelitian ini ;
13. Seluruh teman-teman ekop A dan B 2013 yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan proposal penelitian ini. Diharapkan proposal ini memberikan manfaat sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan setelah membaca proposal ini.

Jakarta, Desember 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. KERANGKA TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual	
1. Kemiskinan	13
2. Upah	23
3. Bantuan Sosial.....	25
4. Tingkat Pendidikan	29
B. Hasil Penelitian yang Relevan	31
C. Kerangka Teoretik	35
D. Perumusan Hipotesis Penelitian	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	40
B. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian	40
C. Metode Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	43
F. Teknik Analisis Data	45

1. Analisis Data Panel.....	46
2. Uji model Pendekatan Estimasi Panel.....	48
3. Deteksi Prasyarat Analisis	50
4. Uji Hipotesis	53
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	57
1. Kemiskinan	57
2. Upah	58
3. Bantuan Sosial.....	59
4. Tingkat Pendidikan.....	60
B. Pengujian Spesifikasi Model	61
1. Pemilihan Model Terbaik	62
a. Uji Chow	62
b. Uji Hausman	63
2. Deteksi Asumsi Klasik	63
a. Deteksi Normalitas	64
b. Deteksi Multikolinearitas	64
c. Deteksi Heterokedastisitas	65
d. Deteksi Autokorelasi	65
3. Persamaan Regresi	66
4. Spesifikasi Fixed Effect	67
5. Pengujian Hipotesis	68
a. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t)	68
b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)	69
c. Koefisien Determinasi	70
C. Pembahasan	71
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Implikasi	78
C. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84
RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Jumlah Penduduk Miskin	84
Lampiran 2 Data Upah Riil	85
Lampiran 3 Data Dana Bantuan Sosial.....	86
Lampiran 4 Data Tingkat Pendidikan.....	87
Lampiran 5 Common Effect.....	88
Lampiran 6 Fixed Effect.....	89
Lampiran 7 Chow Test.....	91
Lampiran 8 Random Effect.....	92
Lampiran 9 Hausman Test.....	94
Lampiran 10 Deteksi Normalitas.....	95
Lampiran 11 Deteksi Heterokedastisitas.....	96
Lampiran 12 Deteksi Multikolinieritas.....	97
Lampiran 13 Deteksi Autokorelasi.....	98
Lampiran 14 Data Panel.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2014.....	2
Table 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2011-2014.....	4
Table 1.3 Upah Regional Provinsi Jawa Tengah.....	6
Tabel 1.4 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 1.5 Data Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah.....	10
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk miskin Tertinggi dan Terendah	58
Tabel 4.2 Data Upah Tertinggi dan Terendah.....	59
Tabel 4.3 Data Dana Bantuan Sosial Tertinggi dan Terendah.....	60
Tabel 4.4 Data Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah.....	61
Tabel 4.5 Uji Chow	62
Tabel 4.6 Uji Hausman	63
Tabel 4.7 Deteksi Heterokedastisitas	64
Tabel 4.8 Deteksi Multikolinieritas	65
Tabel 4.9 Deteksi Autokorelasi	65
Tabel 4.10 Persamaan Regresi	66
Tabel 4.11 Spesifikasi Fixed Effect	67
Tabel 4.12 Hasil uji t	68
Tabel 4.13 Hasil Uji F	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang seringkali dialami berbagai negara adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar bagi pemerintah. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan menjadi masalah baru bagi Indonesia, melainkan topik utama dan telah menjadi fokus kebijakan sejak pemerintahan terdahulu. Meskipun masalah kemiskinan sudah ada sejak lama, namun tetap saja masalah tersebut belum mampu diatasi dengan baik.

Kemiskinan pada umumnya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, lemahnya kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam kepemilikan serta kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Masyarakat tersebut akan tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi.

Menurut data Asian Development Bank (ADB)¹ menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat lima dari delapan data negara ASEAN dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,9 persen. Negara Myanmar berada di peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,6 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin Filipina sebesar 21,6 persen, Laos 23,2 persen, dan Kambodja 14,0 persen. Selain itu, negara dengan persentase penduduk miskin yang rendah adalah negara Thailand sebesar 10,5 persen, Vietnam 7 persen dan Malaysia 0,6 persen.

Selama tahun 2011-2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang. Sementara, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,16 juta orang. Namun, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 0,78 juta orang. Meningkatnya kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan karena meningkatnya harga komoditas beras dan terjadi gejolak perekonomian global pada tahun tersebut².

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015

Periode	Jumlah penduduk miskin (juta orang)
2011	29,89
2012	28,59
2013	28,55
2014	27,73
2015	28,51

Sumber : BPS

¹Asian Development Bank, *Kemiskinan di Indonesia* (<https://www.adb.org/id/Indonesia/poverty/> diakses pada tanggal 20 April 2017)

²Liliy Rusna, *Angka Kemiskinan Meningkat Tembus 28.51 Juta Orang* (http://ekbis.sindo news.com_ diakses pada tanggal 20 Juli 2017)

Kemiskinan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu meningkatnya tindakan kriminalitas. Kemiskinan digambarkan dengan banyaknya masyarakat yang menganggur, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mencari penghasilan dan dorongan terhadap permintaan kebutuhan yang harus dipenuhi menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmani menyatakan bahwa angka kemiskinan yang tinggi menimbulkan peningkatan pula terhadap angka kriminalitas³. Mengingat dampak negatif yang timbul dari kemiskinan, maka masalah kemiskinan harus segera diatasi.

Menurut Badan Pusat Statistik⁴, pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,55 juta orang. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, tahun 2012-2015 provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di provinsi Jawa Timur, urutan kedua di provinsi Jawa Tengah dan urutan ketiga berada di provinsi Jawa Barat.

Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) provinsi Jawa Tengah memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur terutama destinasi wisata⁵. Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), meyakini bahwa Jawa Tengah memiliki potensi untuk menarik para investor, salah satunya adalah potensi jumlah

³Rusnani, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.V, No 1, Maret 2015

⁴Fully Syafi, *Orang Miskin Jawa Timur terbanyak di Indonesia* (<https://m.tempo.co/read/news/2014/01/03/173541819/orang-miskin-jawa-timur-terbanyak-di-indonesia>_ diakses pada tanggal 20 April 2017)

⁵Budi Aris, *Indef sebut Jateng Belum Mampu Mengoptimalkan Potensi Daerahnya* (<https://www.radioidola.com/indef-sebut-jateng-belum-mampu-mengoptimalkan-potensi-daerahnya/>_Diakses pada tanggal 20 November 2017)

penduduk yang banyak dan sebagian besar berusia produktif.⁶ Namun, potensi yang dimiliki belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini terbukti melalui data di bawah ini yang menggambarkan bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Banten	690,90	642,90	677,50	649,19	702,40
DKI Jakarta	355,20	366,3	371,7	393,98	398,92
Jawa Barat	4650,9	4421,5	4375,2	4239,0	4435,7
Jawa Tengah	5256	4863,5	4811,3	4561,8	4577,04
DI Yogyakarta	564,30	565,32	562,10	541,90	550,23
Jawa Timur	5251,45	4992,75	4893,01	4748,40	4789,12

Sumber : BPS Prov Jateng

Tahun 2011 jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah mencapai 5256 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 4561 ribu jiwa. Sementara itu, tahun 2015 jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah bertambah. Tahun 2015 kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4577 ribu jiwa, terdapat penambahan sebesar 16 ribu jiwa. Kepala Bidang Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah komoditas⁷.

⁶Anggara Pernando, *BKPM Ingatkan Potensi Besar yang Dimiliki Jawa Tengah* (<http://semarang.bisnis.com/read/20171124/12/97031/bkpm-ingatkan-potensi-besar-yang-dimiliki-jawa-tengah> _diakses pada tanggal 20 November 2017)

⁷Aris Wasita, *Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Naik* (<http://www.antaranews.com/berita/518217/jumlah-penduduk-miskin-jawa-tengah-naik>_diakses pada tanggal 17 Juli 2017)

Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah telah menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sembilan masalah yang telah dipetakan, yaitu belum berdaulatnya pangan terutama untuk komoditas kedelai, rendahnya kualitas produk garam, belum meratanya pelayanan energi listrik untuk masyarakat, dan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran⁸. Selain itu empat masalah lainnya yaitu rendahnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja penyelenggaraan pendidikan yang belum memuaskan, industri pariwisata yang belum siap bersaing, masih banyaknya aset yang belum dimaksimalkan, dan infrastruktur yang tidak sepenuhnya didukung oleh sektor lain. Dari kesembilan masalah, empat di antaranya menjadi prioritas utama untuk ditangani yakni, ketahanan pangan, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan dan masalah pengangguran.

Kemiskinan timbul akibat dari minimnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah digunakan sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan menunjukkan hasil bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan⁹. Upah di provinsi Jawa Tengah paling rendah jika dibandingkan upah provinsi lainnya, di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2014 menyatakan bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Tengah paling tinggi hanya sebesar Rp 1,38 juta.

⁸Agustinus Purba, *Musrenbangwil Jateng : bappeda petakan 9 masalah untuk segera diatasi* (<http://beritadaerah.co.id/2016/04/01/musrenbangwil-jateng-bappeda-petakan-9-masalahuntuk-segera-diatasi/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017)

⁹Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi*, Vol 1 No 2, Oktober 2014

Angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan nilai UMK tertinggi di seluruh provinsi Jawa lainnya.¹⁰

Pemerintah mengambil kebijakan penentuan upah minimum yang bertujuan agar pendapatan yang diterima oleh masyarakat dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya upah. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur harga pada sekumpulan barang tertentu seperti bahan makanan pokok, perumahan, pakaian, serta barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Upah yang menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat merupakan upah riil. Upah riil artinya kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 1.3
Upah Riil Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Jawa Tengah	Upah Riil (Rupiah)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Upah Riil	532.502	578.975	581.721	767.284	902.823

Sumber : BPS Prov Jateng

Tabel di atas, menggambarkan upah riil provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2011 upah riil provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 532.502,00. Tahun 2012 meningkat sebesar Rp 46.473,00. Tahun 2013 meningkat kembali sebesar Rp 2.746,00 jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 upah riil provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 185.563,00

¹⁰ Galih Gumelar, *Upah Rendah, Jawa Tengah Diincar Perusahaan Padat Karya*, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150616090357-78-60229/upah-rendah-jawa-tengah-diincar-perusahaan-padat-karya/> _diakses pada tanggal 20 November 2017)

menjadi Rp 767.284,00. Tahun 2015 upah riil provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 135.539,00 menjadi Rp 902.823,00.

Selain itu, penyebab timbulnya kemiskinan adalah kurangnya modal yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengelola dan membangun daerahnya. Selama ini, keberlangsungan pengelolaan daerah masih bergantung pada besarnya anggaran yang diberikan pemerintah. Untuk itu, pembelanjaan anggaran yang dilakukan harus mampu memberdayakan potensi yang dimiliki daerah tersebut sehingga dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Keterkaitan pengaruh besarnya anggaran yang dibelanjakan terhadap kemiskinan daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa anggaran belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan¹¹.

Pemerintah berupaya membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan melalui dana sosial yang bersumber dari anggaran belanja pemerintah daerah. Dana bantuan sosial merupakan dana yang termasuk dalam anggaran belanja tidak langsung yang berfungsi untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat dari masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya, salah satunya adalah kemiskinan.

¹¹Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani, "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2012

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Belanja Bantuan Sosial (Ribu rupiah)					
Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah	938.959.410	407.403.028	382.132.197	357.720.547	423.489.871

Sumber : Keuangan APBD

Data tersebut menggambarkan realisasi belanja pemerintah yaitu belanja bantuan sosial mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Tahun 2011 jumlah realisasi belanja sosial mencapai Rp 938.959.410.000,00. Sementara itu, pada tahun 2012 realisasi anggaran mengalami penurunan. Tahun 2013 dan 2014 realisasi anggaran kembali menurun menjadi Rp382.132.197.000,00 dan Rp 357.720.547.000,00. Tahun 2015 realisasi anggaran belanja bantuan sosial meningkat Rp 423.489.871.000,00. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja bantuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka menemukan bahwa pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin¹².

¹² I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, "Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Bali", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 4, No. 5, Mei 2015

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya dalam mendukung masyarakat agar memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu melalui program wajib belajar 9 tahun, yang terdiri dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Tahun 2015, program wajib belajar 9 tahun mulai ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Namun, program wajib belajar 12 tahun ini belum direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan belum meratanya infrastruktur pendidikan untuk membuka sekolah menengah atas atau sederajat¹³.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami masalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menempuh pendidikan kurang dari delapan tahun. Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan kondisi tersebut sangat memprihatinkan sekitar 60% tenaga kerja di Jawa Tengah saat ini masih lulusan Sekolah Dasar (SD)¹⁴. Artinya pertumbuhan jumlah orang-orang terdidik masih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang belum cukup terdidik.

¹³Ester Lince, *Pemerintah Daerah Harus Perkuat Wajib Belajar 12 Tahun* (http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/17/08542212/Pemerintah.Dearah.Harus.Perkuat.Wajib.Belajar.12.Tahun_ diakses pada tanggal 9 Maret 2015)

¹⁴ Lingga Sukatma Wiangga, *Tingkat Pendidikan Rendah, Pemprov Jateng Pacu Budaya Literasi* (http://kabar24.bisnis.com/read/20170508/78/651995/tingkat-pendidikan-rendah-pemprov-jateng-pacu-budaya-literasi_diakses pada tanggal 20 November 2017)

Tabel 1.5
Data Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah

Wilayah Jateng	Rata-rata Lama Sekolah				
	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	6.74	6.77	6.8	6.93	7,03

Sumber : BPS Prov Jateng

Data tersebut menggambarkan bahwa penduduk Jawa Tengah tingkat pendidikannya masih rendah. Hal tersebut digambarkan dengan rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Tengah selama 6 tahun, artinya masyarakat Jawa Tengah hanya lulusan Sekolah Dasar. Jenjang pendidikan yang mereka tempuh masih dalam tahap dasar. Kemampuan membaca, menulis, dan perhitungan dasar yang mereka miliki.

Mengurangi jumlah kemiskinan dapat membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional. Mengingat provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi sehingga menjadi penyumbang besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, upaya pemerintah baik nasional maupun daerah diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan harga bahan makanan pokok yang tidak diikuti dengan kenaikan upah akan menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan.

2. Meningkatnya jumlah pengangguran menggambarkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendapatan guna memenuhi kebutuhan.
3. Rendahnya upah yang diperoleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan.
4. Rendahnya realisasi bantuan sosial dari pemerintah menyebabkan sulitnya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena keterbatasan modal.
5. Rendahnya tingkat pendidikan akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk itu, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian hanya fokus ke dalam permasalahan yang akan diteliti. Maka, penelitian ini dibatasi hanya pada masalah upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat pengaruh antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh upah terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah terdapat pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kemiskinan. Dalam penelitian ini, membahas tiga faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinan yaitu upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan di daerah penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Definisi Konseptual

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai masyarakat dengan keadaan ekonomi yang lemah. Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran¹⁵. Penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sebesar Rp344.809 per kapita per bulan.¹⁶

Sholch dalam Ali Khomsan *et.al*, mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan tersebut akibat dari kurangnya kesempatan seseorang dalam berusaha¹⁷. Friedman dalam Amir Machmud menyatakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi

¹⁵bps.go.id, *Kemiskinan* (<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>, diakses pada tanggal 11 Februari 2017)

¹⁶ Martin Sihombing, *Garis Kemiskinan di Indonesia Naik 2,78%* (<http://finansial.bisnis.com/read/> diakses pada tanggal 14 Desember 2017)

¹⁷Ali Khomsan et al., *Indikator kemiskinan dan Misklasifikasi orang miskin* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 1.

sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi¹⁸.

Menurut Andre Bayo Ala dalam Subandi¹⁹, berpendapat bahwa kemiskinan bersifat multidimensional artinya kemiskinan memiliki banyak aspek yang disebabkan karena kebutuhan yang beranekaragam. Kemiskinan jika dilihat dari kebijakan umum terbagi menjadi dua yang meliputi aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi yang dialami seseorang, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bank Dunia mendefinisikan keadaan miskin sebagai : *“Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”*²⁰. Maksudnya, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau minimum. Dengan demikian, ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dari tingkat pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Garis kemiskinan dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar.

¹⁸Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia : Pasca Reformasi* (Jakarta : Erlangga, 2016), h. 281

¹⁹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 91

²⁰World Development Report (Washington D.C : Oxford University Press,1990), h.26

Kebutuhan minimum dapat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, keadaan geografis, kemajuan ekonomi, dan faktor lainnya²¹.

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diukur berdasarkan perbandingan pendapatan seseorang dengan pendapatan orang lain disekitarnya.²² Jika pendapatan orang tersebut lebih rendah dibandingkan pendapatan di lingkungan sekitarnya, maka seseorang tersebut digolongkan dalam kemiskinan relatif walaupun pendapatannya berada di atas garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Menurut Ginandjar, kemiskinan dapat dikaji berdasarkan keadaan penduduk dan potensi wilayah²³. Jika dikaji berdasarkan keadaan penduduk maka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan yang besarnya telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan jika dikaji dalam potensi wilayah, maka potensi wilayah yang tertinggal akan menyebabkan perkembangan jumlah kemiskinan. Untuk itu, dibutuhkan adanya bantuan modal untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal, agar potensi wilayah dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar, dikarenakan kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan sama sekali tidak memiliki pendapatan. Selain itu, kemiskinan juga timbul akibat tidak ada sumber daya yang dimiliki,

²¹ Gunawan Sumodiningrat, dkk, *Kemiskinan : Teori, Fakta, dan Kebijakan* (Jakarta : IMPAC, 1999), h. 2

²² *Ibid*, h.3

²³ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 1996), h.236

baik sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia (kemampuan).

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Ali Khomsan²⁴, kemiskinan merupakan ketidakberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dari sisi ini, maka kemiskinan terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang timbul akibat dari pola hidup seseorang atau sekelompok orang yang bersifat malas, boros, dan tidak kreatif walaupun mereka telah mendapatkan bantuan dari pihak luar. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan sosial maupun politik yang tidak mendukung pengurangan kemiskinan.

Kemiskinan dikaji dari pola waktunya terbagi menjadi 4 macam²⁵, yaitu :

1. *Persisten Poverty*, yaitu kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun.
2. *Cyclical Poverty*, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dari pola siklus ekonomi secara keseluruhan
3. *Seasonal Poverty*, yaitu kemiskinan musiman. Kemiskinan yang biasanya terjadi pada nelayan atau para petani. Karena pendapatannya bergantung pada musim yang sedang terjadi pada saat itu.
4. *Accidental Poverty*, yaitu kemiskinan yang timbul akibat dari bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk.

²⁴ Ali Khomsan, Op.cit,h. 3

²⁵ Ginanjar Kartasasmita, Op.cit, h. 235-240

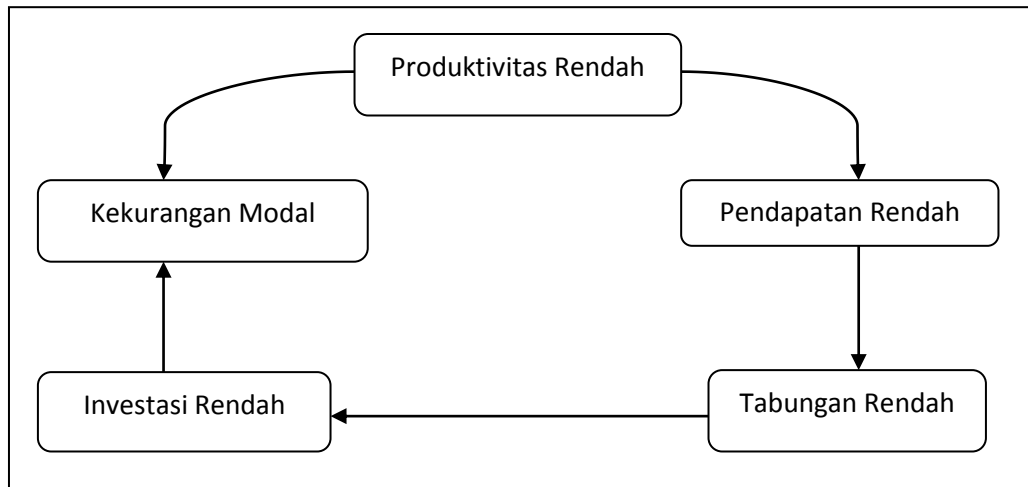
Setiap pola kemiskinan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan wilayahnya. Apabila suatu wilayah terdapat banyak penduduk miskin, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daerah yang tertinggal. Kemiskinan umumnya disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kondisi wilayah yang berada di pedalaman.

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah, kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, tingkat kesehatan menentukan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kesehatan secara fisik dan psikis dapat membantu seseorang dalam mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Daerah dengan tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, akan sulit untuk bekerja. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Jika seseorang tidak bekerja dan tidak mendapatkan tempat untuk bekerja, maka orang tersebut tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, daerah yang berada di wilayah tertinggal dapat menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut tidak dapat dijangkau untuk diberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang dapat membantu kemajuan masyarakat. Dari keempat faktor, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan memperbaiki keempat faktor tersebut.

Shrap, *et.al* yang dikutip oleh Kuncoro dalam Subandi juga mengidentifikasi ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi²⁶, yaitu :

1. Secara mikro, kemiskinan timbul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas yang mengurangi tingkat pendapatan. Untuk itu, suatu lingkungan masyarakat yang kekurangan modal akan berdampak pada pendapatan masyarakatnya yang relatif sedikit. Rendahnya pendapatan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan mengakibatkan keterbelakangan dan seterusnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam teori “Lingkaran Setan Kemiskinan”.

²⁶ Subandi, *op.cit.*, h.78



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa dalam lingkaran tersebut mengandung deretan kekuatan-kekuatan yang satu sama lain saling beraksi dan bereaksi sehingga suatu negara miskin akan tetap berada dalam kemiskinan seperti yang terdapat dalam dalil kuno : “Suatu Negara miskin karena ia miskin”²⁷.

c. Indikator kemiskinan

Pada umumnya kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Jika pendapatan yang diperoleh seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar maka orang tersebut tergolong miskin.

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan

²⁷R.Nurkse, *Problems of capital Formation in Underdeveloped Countries*, h. 4

keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas²⁸.

Menurut BPS, kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)²⁹. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, antara lain :

1. *Head Count Index (HCI-P0)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK)
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yaitu gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Selain itu, BPS juga melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga. Data tersebut digunakan untuk mencirikan kemiskinan secara konseptual (penentuan kebutuhan

²⁸ Achmad Faqih, *Kependudukan : Teori, Fakta, dan Masalah* (Yogyakarta : Deepulish), h.148

²⁹Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), h.174

dasar/garis kemiskinan³⁰. Berikut ini adalah kriteria rumah tangga miskin menurut BPS, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

³⁰ *Ibid*, h.173

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni : tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan tingkat kesejahteraan.³¹

Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Sajogyo dalam Lincolin Arsyad tingkat konsumsi beras digunakan sebagai indikator kemiskinan³². Jika suatu daerah yang makanan pokoknya beras namun tingkat konsumsi berasnya rendah, maka terdapat faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan yang minim akan menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli beras. Golongan masyarakat miskin di desa diukur dengan tingkat konsumsi berasnya kurang dari 240 kg perkapita pertahun. Sedangkan di daerah perkotaan tingkat konsumsi beras mencapai 360 kg perkapita pertahun.

Tingkat pendapatan menjadi indikator kemiskinan. Karena tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut digolongkan sebagai masyarakat miskin.

Gizi merupakan faktor penting dalam membantu proses pertumbuhan. Seseorang yang kekurangan gizi pasti rentan terkena penyakit dan mengalami hambatan dalam proses pertumbuhannya, baik pertumbuhan secara fisik maupun

³¹ Subandi, *op.cit*, h. 80

³²Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), h.303

psikisnya. Jika hal itu terjadi, maka kegiatannya akan terbatas. Untuk itu, kecukupan gizi menjadi indikator kemiskinan. Kecukupan gizi merupakan bagian dari kebutuhan fisik yang harus terpenuhi agar mampu menjalani aktivitas sehari-hari.

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat melakukan aktivitas secara optimal. Kebutuhan fisik diukur dari jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan. Kebutuhan Fisik Minimum (FKM) ditinjau selama sebulan dari seorang pekerja, untuk mengetahui jumlah minimum kandungan makanan yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat-syarat kesehatan.

Tingkat kesejahteraan sosial secara umum dapat ditinjau berdasarkan komponen pendapatan dan pengeluaran. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, maka tingkat kesejahteraan sosialnya tinggi begitupun sebaliknya. Berdasarkan publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of living : An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan³³.

2. Upah

Upah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Besarnya upah yang diperoleh menentukan jumlah dan jenis kebutuhan yang dapat terpenuhi. Berdasarkan teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik

³³ Subandi, *op.cit.*, h.81

maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha³⁴. Menurut Nurlaily dan Budiyono dalam bukunya, upah merupakan pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar³⁵. Upah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan di wilayah tersebut (upah minimum regional) dan telah disepakati bersama antara pekerja dan perusahaan.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan³⁶,

Upah adalah :

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut BPS upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau undang-undang dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya³⁷.

Badan Pusat Statistik juga membagi upah berdasarkan dua jenis, yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah upah yang diterima buruh, sebagai

³⁴ Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi : Teori Pengantar (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h.351

³⁵ Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, Teori Ekonomi (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.93

³⁶ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Upah* (<https://www.bps.go.id/index.php/istilah/661> diakses pada tanggal 11 Maret 2017)

balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah riil menggambarkan daya beli atau kemampuan dari upah yang diterima buruh untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)³⁸.

Dari definisi-definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upah adalah balas jasa atas usaha yang dilakukan oleh tenaga kerja. Besarnya upah disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut dan telah mencapai kesepakatan antara tenaga kerja dengan perusahaan.

3. Bantuan Sosial

Pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah perbelanjaan yang dilakukan pemerintah untuk barang-barang modal, barang-barang konsumsi dan jasa-jasa³⁹. Menurut BPS belanja pemerintah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program, seperti : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program, seperti : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan UU, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga.

³⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers,2015), h.351

³⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 61

Penelitian ini membahas belanja pemerintah dalam bidang sosial untuk mengetahui pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial⁴⁰. Bantuan sosial merupakan belanja/pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana bantuan sosial ditujukan kepada:

1. Individu, keluarga, masyarakat, atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
2. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Tujuan dalam penyaluran dana bantuan sosial adalah:

- a. rehabilitasi sosial, khususnya bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Jenis kegiatan rehabilitasi sosial meliputi :

1. pelatihan vokasional;

⁴⁰*Profil Dana Bantuan Sosial* (<http://ehibahbansos.bantenprov.go.id/index.php?r=home/> Profil Bansos_ diakses pada tanggal 30 Juli 2017)

2. pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. pelayanan aksesibilitas;
 6. bimbingan sosial dan konseling;
 7. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
 8. bimbingan resosialisasi
- b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Jenis kegiatan perlindungan sosial meliputi
1. bantuan langsung;
 2. penyediaan kelembagaan;
 3. penguatan kelembagaan;
 4. advokasi sosial; dan/atau;
 5. bantuan hukum.
- c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jenis kegiatan pemberdayaan sosial meliputi
1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 2. pelatihan keterampilan;
 3. pemberian stimulan modal;

4. peralatan usaha dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. penataan lingkungan;
 7. penguatan keserasian sosial; dan
 8. pendampingan.
- d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis jaminan sosial meliputi tunjangan berkelanjutan dan batuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- e. penanggulangan kemiskinan, adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kegiatan penanggulangan sosial ini meliputi:
1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 2. pelayanan sosial;
 3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan
 7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- f. penanggulangan bencana, meliputi:

1. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
2. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
3. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. santunan duka cita; dan
5. santunan kecacatan.

Dari definisi-definisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat membangun kehidupan suatu bangsa. Pendidikan menjadi sarana untuk menciptakan generasi-generasi berkualitas. Menurut Prof. Dr. John Dewey dalam Saifuddin menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalaman manusia selama mengalami pertumbuhan tanpa mengenal batas usia. Pendidikan menciptakan kecakapan pada manusia di setiap perkembangan kehidupannya⁴¹. *Dictionary of Education* mengemukakan pendidikan merupakan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah laku lainnya di dalam lingkungan kehidupannya⁴².

Ki Hajar Dewantara dalam Moh. Solikodin juga menyatakan bahwa pendidikan umumnya merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan

⁴¹ Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis* (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h.168

⁴² Moh. Solikodin et.all. *Dasar-Dasar Kependidikan* (Tangerang : PT Pustaka Mandiri, 2015), h. 4

seseorang dalam budi pekerti (kekuatan batin, karakter) dan pikiran (intelekt)⁴³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman.

Menurut BPS, pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan formal. Pendidikan ini bersifat sebagai pelengkap dari pendidikan formal, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Menurut BPS Keberlangsungan proses pendidikan dan kualitas output yang dihasilkan dapat digambarkan melalui indikator pendidikan⁴⁴, yang terdiri dari :

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah angka yang menunjukkan banyaknya anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka yang menunjukkan banyaknya anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

⁴³ *Ibid*, h. 5

⁴⁴ *Indikator Pendidikan* (https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1525_ diakses pada tanggal 24 Nov 2017)

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka yang menunjukkan banyaknya anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- Angka Buta Huruf adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- Angka Putus Sekolah adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan

Dari definisi-definisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran individu untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang diikuti dengan perubahan pola pikir dan tingkah laku sesuai dengan tingkat pendidikan yang di tempuhnya.

B. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

Penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”.

Penelitian ini dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan⁴⁵.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik maupun publikasi, jurnal-jurnal maupun brosur-brosur serta buku referensi dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode yang bersifat kuantitatif yaitu untuk melihat seberapa besar dan bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah terhadap tingkat kemiskinan di Riau. Dalam penelitian ini menggunakan metode linear regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independent yaitu jumlah pengangguran dan tingkat upah terhadap variabel dependent yaitu tingkat kemiskinan di Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di provinsi Riau. Elastisitas dari upah minimum provinsi sebesar -0,392 dapat diinterpretasikan jika upah minimum provinsi meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,392 persen. Dengan asumsi variabel lain (jumlah pengangguran terbuka) tetap.

2. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal

⁴⁵ Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan, *op.cit*, h.9

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal”. Penelitian ini dilakukan oleh Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani⁴⁶. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah belanja-belanja daerah menurut klasifikasi fungsi memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan melalui pengujian regresi berganda menggunakan data panel dengan menggunakan data Indeks Kemiskinan dan belanja per kapita menurut fungsi Ekonomi, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota di Pulau Jawa-Bali untuk periode tahun 2008-2010.

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diuji secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Kemiskinan. Belanja Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial terbukti mampu menurunkan Indeks Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa-Bali untuk periode 2008-2010, sementara peningkatan belanja per kapita untuk belanja Perumahan dan Fasilitas Umum justru akan meningkatkan Indeks Kemiskinan.

3. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali

Penelitian yang berjudul “Beberapa Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan oleh I.A Septyana

⁴⁶ Sampurna Budi Utama dan Nur Aisyah Kustiani, *op.cit*, h.4

Mega Putri, Ni Nyoman Yuliarmi⁴⁷. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2007-2011. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non perilaku. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4. Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali” dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka⁴⁸. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin, serta

⁴⁷I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, “Beberapa Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 2, No.10, Oktober 2013

⁴⁸I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, *op.cit*, h.7

untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2007-2013 dengan menggunakan program SPSS. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap jumlah penduduk miskin yaitu variabel PDRB per kapita.

C. Kerangka Teoretik

1. Tingkat Upah dengan Kemiskinan

Upah merupakan imbalan balas jasa yang diterima pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jika seseorang memiliki upah yang rendah, maka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan termasuk dalam kemiskinan. Menurut Ragnar Nurkse dalam teori “Lingkaran Kemiskinan” menyatakan bahwa tingkat upah yang rendah menyebabkan kemiskinan, hal ini dikarenakan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan⁴⁹.

⁴⁹ Amir Machmud, *op.cit*, h.285

Gregory Mankiw juga mengungkapkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan para pekerja dan dapat mengurangi kemiskinan⁵⁰. Dengan demikian, tingkat upah dapat mengurangi kemiskinan.

2. Bantuan Sosial dengan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang dibelanjakan pemerintah untuk memenuhi program yang telah direncanakan maupun tidak oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam bidang sosial diperlukan untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah sosial salah satunya yaitu kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat menjadi modal yang dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Menurut *World Development Report* pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan kesejahteraan⁵¹. Program padat karya dan bantuan pangan atau transfer dana tunai juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat yang lemah. Program-program tersebut yang dikelola dengan baik dapat membantu pengentasan kemiskinan.

Selain itu, menurut Suparno pengeluaran pemerintah dalam bentuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.⁵² Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah akan mendorong investasi sehingga semakin banyak orang yang akan terlibat dalam perekonomian.

⁵⁰ N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi* (Jakarta :Erlangga, 2006), h.162

⁵¹ World Development Report, *Pertanian untuk Pembangunan* (Jakarta : Salemba Empat : 2008), h. 27

⁵² Suwandi, *Desentralisasi Fiskal* (Yogyakarta : Deepublish,2015), h.114

Selain itu, menurut Todaro kemiskinan umumnya berada di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian masyarakatnya di bidang-bidang pertanian. Untuk itu, pengeluaran pemerintah dalam bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan masyarakat dan program-program pembangunan sebagian besar dialokasikan ke masyarakat miskin daerah pedesaan untuk menanggulangi kemiskinan⁵³. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah baik dalam bidang sosial maupun layanan publik dapat membantu mengurangi kemiskinan.

3. Tingkat Pendidikan dengan Kemiskinan

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jika disuatu daerah mayoritas pendidikan penduduknya rendah, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut tinggi. Dalam teori marginal yang dikemukakan oleh Oscar Lewis, dalam konsepnya yaitu *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, kemiskinan timbul dari dalam diri manusia itu sendiri yang menyerah pada nasib dan tidak mau berusaha. Selain itu kurangnya rasa tanggungjawab dalam memainkan peran masing-masing anggota keluarga, kurangnya pendidikan atau rendahnya pendidikan yang ditempuh, kurang memiliki ambisi untuk membangun masa depan.⁵⁴

Menurut Tulus Tambunan salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah⁵⁵. Meier dan Baldwin juga mengemukakan suatu konsep lingkaran kemiskinan dari Ragnar Nurkse. Lingkaran kemiskinan ini

⁵³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2006), h.269

⁵⁴ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1984)

⁵⁵ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia : Beberapa Isu Penting* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.127

timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat yang masih terbelakang dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari pendidikan masyarakat yang relatif rendah⁵⁶.

Menurut Ginandjar kondisi kemiskinan salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang⁵⁷.

Teori-teori tersebut menggambarkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk memperoleh keahlian maupun keterampilan untuk mengembangkan diri di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan produktivitas orang tersebut, karena ilmu dan pengetahuan diperoleh lebih banyak. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan individu. Peningkatan pendapatan individu tersebut dapat meningkatkan konsumsi mereka, dan dapat terhindar dari kemiskinan.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori di atas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh negatif antara tingkat upah terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

⁵⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Daerah : Pengantar Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta : BPFE, 2016), h. 82

⁵⁷ Ginandjar Kartasmita, *op.cit.*, h. 240

2. Terdapat pengaruh negatif antara bantuan sosial terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
3. Terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
4. Terdapat pengaruh antara upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliabel) tentang pengaruh antara upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan di provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai upah, bantuan sosial, tingkat pendidikan, dan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 9 bulan yaitu pada bulan April 2017 - Desember 2017. Objek penelitiannya adalah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antara upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

C. Metode Penelitian

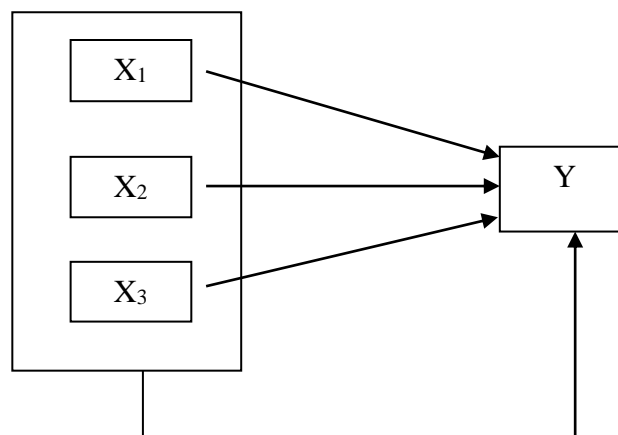
1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ex post facto*. Metode tersebut meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan judul penelitian dan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar dan tepat mengenai pengaruh tingkat upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2015.

2. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel

Penelitian ini memilih variabel kemiskinan sebagai variabel terikat (Y). Sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat upah (X_1), bantuan sosial (X_2), dan tingkat pendidikan (X_3). Konstelasi pengaruh antar variabel di atas digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

X_1 : Upah

X_2 : Bantuan sosial

X_3 : Tingkat pendidikan

Y : Kemiskinan

→ : Pengaruh

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

1. Data per tahun jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah.
2. Data per tahun Upah Minimum Regional dan Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah. Kemudian kedua data tersebut diolah, menjadi data upah riil provinsi Jawa Tengah.
3. Data per tahun realisasi belanja bantuan sosial menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah.

4. Data per tahun rata-rata lama sekolah (RLS) menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Kemiskinan

a. Definisi Konseptual

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan tersebut.

b. Definisi Operasional

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014. Standar kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS adalah menurut Garis Kemiskinan (GK) yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SuSENAS).

2. Upah

a. Definisi Konseptual

Upah merupakan pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam hal

ini, tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.

b. Definisi Operasional

Upah merupakan balas jasa yang diterima oleh pekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indikator upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah riil. Upah riil dihitung dengan cara tahun dasar dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan dikalikan dengan besarnya upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bantuan Sosial

a. Definisi Konseptual

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b. Definisi Operasional

Bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan dapat berupa uang/barang. Bantuan sosial dalam penelitian ini diperoleh dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Tengah berdasarkan kabupaten/kota tahun 2011-2015.

4. Tingkat Pendidikan

a. Definisi Konseptual

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal terakhir yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Pendidikan formal meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.

b. Definisi Operasional

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh seseorang. Tingkat pendidikan diukur menggunakan data rata-rata lama sekolah (RLS) yang diperoleh dari BPS provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berdasarkan jenjang pendidikan meliputi SD (6 tahun), SMP/MTs/ sederajat (3 tahun), dan SMA/MA/ sederajat (3 tahun), dan Perguruan Tinggi. Data rata-rata lama sekolah (RLS) yang digunakan berdasarkan data masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel adalah gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section* (data silang). Data *time series* meliputi satu objek tetapi menggunakan beberapa periode seperti (bulanan, kuartalan, dan tahunan). Sedangkan data *cross section* meliputi banyak objek dan menggunakan beberapa jenis data dalam suatu periode tertentu.

1. Analisis Regresi Data Panel

Analisis model regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui⁵⁸. Untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari tiga variabel yakni tingkat upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dengan persamaan sebagai berikut⁵⁹ :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it,1} + \beta_2 X_{it,2} + \beta_3 X_{it,3} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y : Kemiskinan (variabel terikat)
- β_0 : Koefisien titik potong intersep
- β_1 : Koefisien tingkat upah
- β_2 : Koefisien bantuan sosial
- β_3 : Koefisien tingkat pendidikan
- X_1 : Upah (variabel bebas)
- X_2 : Bantuan Sosial (variabel bebas)
- X_3 : Tingkat pendidikan (variabel bebas)
- i : Kab/kota Jawa Tengah
- t : Waktu (2011-2014)
- e : Error/disturbance (variabel pengganggu)

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, karena data yang digunakan adalah data panel. Data panel akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap objek dan periode waktunya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) pada setiap variabelnya hal

⁵⁸Agus Widarjono, *Ekonometrika* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013), h.7

⁵⁹Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2006), p. 122

ini bertujuan untuk meniadakan atau meminimalkan adanya penyimpangan deteksi normalitas dalam deteksi asumsi klasik.

Terdapat tiga estimasi model menggunakan data panel, yaitu :

a. Model Common Effect (CEM)

CEM merupakan pendekatan yang menggabungkan model data panel yaitu seluruh data *time series* dengan data *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Model Fixed Effect

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat intersep yang berbeda antar individu dan objek, tetapi memiliki *slope regresi* yang sama. Suatu objek memiliki intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu dan juga koefisien regresinya yang tetap dari waktu ke waktu. Untuk membedakan suatu individu dengan individu lainnya digunakan *dummy variabel* (varibel contoh/semu). Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variabel* (LSDV).

c. Model Random Effect

Model ini akan mengestimasi data panel dimana residual yang diduga saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasikan melalui *error terms*. Keuntungan menggunakan metode *Random Effect* yakni menghilangkan

heterokedastisitas. Model ini juga disebut sebagai *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

2. Uji model Pendekatan Estimasi Panel

Untuk menemukan model yang paling tepat digunakan antara *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* dalam penelitian ini maka harus dilakukan beberapa pengujian, antara lain :

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara *fixed effect model* dengan *common effect model*.

Hipotesis dalam uji Chow :

H_0 : *common effect model*

H_1 : *fixed effect model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan F statistik dan F tabel.

Perhitungan F statistik dapat menggunakan rumus :

$$F = \frac{[SSR_1 - SSR_2]/(n - 1)}{SSR_2/-(nT - n - k)}$$

Keterangan :

SSR_1 = *Sum Square Resid model common effect*

SSR_2 = *Sum Square Resid model fixed effect*

n = Jumlah individu (*cross section*)

t = Jumlah periode waktu (*time series*)

k = Jumlah variabel independen

Apabila nilai F statistik \geq F tabel maka H_0 ditolak, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Model Fixed Effect*. Jika nilai F

statistik $\leq F$ tabel maka H_0 diterima, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Model Common Effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model efek acak (*Random Effect Model*) dengan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Dalam perhitungan uji statistik Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross section* lebih besar dibandingkan dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Selain itu, dalam estimasi statistik uji Hausman diperlukan estimasi variansi *cross section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila, kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *fixed effect*⁶⁰.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini :

H_0 : model *random effect*

H_1 : model *fixed effect*

Jika nilai p-value \leq taraf signifikansi yang ditentukan, maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih adalah model *fixed effect*.

c. Uji Breusch-Pagan

Uji *Breuch-Pagan* merupakan Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antar *random effect model* dengan *common effect model*.

Hipotesis

$H_0 =$ *Common Effect model*

⁶⁰ Dedi Rosadi, *Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan* (Yogyakarta : ANDI, 2012), h. 274

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it})}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \hat{u}_{it}^2} - 1 \right]$$

Keterangan :

N = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

i = data ke - i

\hat{u}_{it} = Estimasi residual model koefisien tetap individu ke-i periode ke-t

Jika nilai $LM \geq \alpha$ atau *p-value* kurang dari taraf signifikansi yang digunakan, maka tolak hipotesis awal (H_0) sehingga model yang terpilih adalah *random effect model*.

3. Deteksi Prasyarat Analisis

Uji asumsi Klasik dipergunakan agar hasil estimasi memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yaitu pada model tidak terdapat multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji Asumsi Klasik adalah sebagai berikut :

a. Deteksi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* ini menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis* dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : data berdistribusi normal

H_1 : data berdistribusi tidak normal

Adapun formula uji statistik J-B adalah sebagai berikut :

$$JB = n \frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24}$$

Keterangan :

n : banyaknya data

S : menyatakan kemencengan (*skewness*)

K : menyatakan keruncingan (*kurtosis*)

Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Jarque bera* $> 0,05$ maka H_0 diterima artinya data berdistribusi normal⁶¹. Sedangkan jika nilai *Jarque-bera* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya data berdistribusi tidak normal.

b. Deteksi Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data yang baik adalah data yang homoskedastisitas.

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji heterokedastisitas umum *white* dengan bantuan *Software Eviews 8*.

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : varians eror bersifat homoskedastisitas

H_1 : varians eror bersifat heterokedastisitas

⁶¹ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Yogyakarta ,UPP STIM YKPN,2009),p.537

Jika hasil *p-value Prob.Chi Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya varians eror bersifat homoskedastisitas. Sedangkan jika H_0 ditolak, *p-value Prob.Chi Square* $< 0,05$ memberikan indikasi bahwa model mengalami heterokedastisitas⁶².

c. Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat.

Beberapa cara dalam mendeteksi adanya multikolinieritas, diantaranya :

- 1) Memeriksa koefisien-koefisien korelasi sederhana antar variabel-variabel penjelas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinieritas.
- 2) Menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) merupakan suatu cara mendeteksi multikolinieritas dengan melihat sejauh mana sebuah variabel penjelas dapat diterangkan oleh semua variabel penjelas lainnya di dalam persamaan regresi. Jika nilai VIF dari suatu variabel lebih dari ($>$) 10, maka terdapat multikolinieritas.

d. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear

⁶²Moch.Doddy Afrianto, *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views* (Jakarta : Erlangga,2007),h. 41

terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $t-1$ yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat autokorelasi di dalamnya.

Cara mendeteksi autokorelasi dengan metode *Brusch-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier*). Dengan Kriteria apabila nilai Prob. F hitung $>$ alpha (5%) berarti tidak terjadi autokorelasi, namun sebaliknya apabila nilai Prob. F hitung $<$ alpha (5 %) berarti terdapat autokorelasi⁶³.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$.

a. Uji Keberartian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t dapat dihitung menggunakan rumus :

$$t = \frac{R \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi variabel

R^2 : koefisien determinasi variabel

n : jumlah data

⁶³Ansolino, dkk, *Buku Ajar Ekonometrika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), p.64-66

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

1) Hipotesis statistik untuk variabel upah:

$H_0 : \beta \leq 0$ tidak ada pengaruh antara upah terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta > 0$ ada pengaruh antara upah terhadap kemiskinan

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima, maka upah tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2) Hipotesis statistik untuk variabel bantuan sosial :

$H_0 : \beta \leq 0$ tidak ada pengaruh antara bantuan sosial terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta > 0$ ada pengaruh antara bantuan sosial terhadap kemiskinan

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima, maka bantuan sosial tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3) Hipotesis statistik untuk variabel tingkat pendidikan:

$H_0 : \beta \leq 0$ tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta > 0$ ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima, maka tingkat pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis koefisien (slope) regresi secara bersamaan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak dalam menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Statistik uji :

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah data

Hasilnya dibandingkan dengan tabel F, dengan taraf signifikan (α) adalah 0,05. Hipotesis adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta \leq 0$ tidak ada pengaruh antara upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta > 0$ ada pengaruh antara upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan

Kriteria pengujiannya, yaitu :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

c. Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*) dinotasikan dengan *R-squares* yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y + \beta_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, artinya keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model dimana $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika nilai R^2 mendekati 0 , artinya kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Jika R^2 mendekati satu, artinya kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah upah berdasarkan nilai upah riil sebagai variabel bebas (X_1), realisasi anggaran bantuan sosial (X_2), dan tingkat pendidikan berdasarkan angka rata-rata lama sekolah (X_3). Data kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk sebagai variabel terikat (Y).

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dialami berbagai Negara karena kemiskinan menggambarkan keadaan masyarakat yang tidak sejahtera.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah berdasarkan 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Data tingkat kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015.

Berdasarkan data pada lampiran I, jumlah penduduk miskin kabupaten/kota Jawa Tengah tertinggi dari tahun 2011-2015 adalah kabupaten Brebes tahun

2011 sebesar 394.400 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah adalah kota salatiga tahun 2015 sebesar 10.600 jiwa.

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk miskin Tertinggi dan Terendah
(Jiwa)

Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
Tahun	Provinsi	Jumlah	Tahun	Provinsi	Jumlah
2011	Kab Brebes	394400	2011	Kota Magelang	13100
2012	Kab Brebes	364900	2012	Kota Magelang	12100
2013	Kab Brebes	367900	2013	Kota Salatiga	11500
2014	Kab Brebes	355100	2014	Kota Salatiga	10800
2015	Kab Brebes	352000	2015	Kota Salatiga	10600

Sumber : BPS Prov.Jateng,diolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2011-2015 terdapat di kabupaten Brebes. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2011-2012 terletak di kota Magelang dan jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2013-2015 terletak di kota Salatiga.

2. Upah

Upah merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Penelitian ini menggunakan data upah riil yang diperoleh dari perhitungan upah minimum dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan data pada lampiran II, upah riil di kabupaten/kota Jawa Tengah terbesar dari tahun 2011-2015 adalah kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 1.383.756,00. Sedangkan upah riil terendah terdapat di kabupaten Kebumen tahun tahun 2013 sebesar Rp 530.563,00.

Tabel 4.2
Data Upah Riil Tertinggi dan Terendah
(Rupiah)

Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
Tahun	Provinsi	Jumlah	Tahun	Provinsi	Jumlah
2011	Kota Semarang	750.564	2011	Kab Kebumen	534.259
2012	Kota Semarang	738.328	2012	Kab Kebumen	540.427
2013	Kota Semarang	832.198	2013	Kab Kebumen	530.563
2014	Kota Semarang	1.198.939	2014	Kab Purworejo	572.183
2015	Kota Semarang	1.383.756	2015	Kab Purworejo	708.035

Sumber : BPS Prov.Jateng,diolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel di atas, upah riil tertinggi tahun 2011-2015 terletak di kota Semarang. Sedangkan upah riil terendah tahun 2011-2013 terletak di kabupaten Kebumen dan upah riil terendah tahun 2014-2015 terletak di kabupaten Purworejo.

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari masalah-masalah sosial. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah berdasarkan 35 kab/kota tahun 2011-2015.

Berdasarkan data pada lampiran III, dana bantuan sosial terbesar dari tahun 2011-2015 terletak di kabupaten Semarang tahun 2015 sebesar Rp 92.136.800.000,00. Sedangkan dana bantuan sosial terendah terletak di kota Surakarta tahun 2014 sebesar Rp 57.000.000,00.

Tabel 4.3
Data Dana Bantuan Sosial Tertinggi dan Terendah
(Rupiah)

Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
Tahun	Provinsi	Jumlah	Tahun	Provinsi	Jumlah
2011	Kab demak	6.689.8584.000	2011	Kab wonogiri	1.804.500.000
2012	Kab karanganyar	87.245.467.000	2012	Kota Surakarta	91.500.000
2013	Kab batang	50.049.360.000	2013	Kota Surakarta	197.933.000
2014	Kab kudus	32.133.595.000	2014	Kota Surakarta	57.000.000
2015	Kab semarang	92.136.800.000	2015	Kab wonogiri	617.500.000

Sumber : BPS Prov.Jateng,diolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel di atas, dana bantuan sosial tertinggi tahun 2011 diperoleh kabupaten Demak, tahun 2012 diperoleh kabupaten Karanganyar, tahun 2013 diperoleh kabupaten Batang, tahun 2014 diperoleh kabupaten Kudus, dan pada tahun 2015 diperoleh kabupaten Semarang. Sedangkan dana bantuan sosial terendah tahun 2011 diperoleh kabupaten Wonogiri, tahun 2012-2014 diperoleh kabupaten Surakarta, dan tahun 2015 diperoleh kabupaten Wonogiri.

4. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan kualitas seseorang. Penelitian ini menggunakan data tingkat pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan data pada lampiran IV, rata-rata lama sekolah tertinggi di kabupaten/kota Jawa Tengah dari tahun 2011-2015 adalah kota Surakarta tahun 2015 sebesar 10.36 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di kabupaten Pemalang tahun 2011 sebesar 5.19 tahun.

Tabel 4.4
Data Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah
(Tahun)

Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
Tahun	Provinsi	Jumlah	Tahun	Provinsi	Jumlah
2011	Kota megelang	10,14	2011	Kab pemalang	5,19
2012	Kota magelang	10,2	2012	Kab brebes	5,38
2013	Kota Surakarta	10,25	2013	Kab brebes	5,68
2014	Kota Surakarta	10,33	2014	Kab brebes	5,86
2015	Kota Surakarta	10,36	2015	Kab brebes	5,88

Sumber : BPS Prov.Jateng,diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, daerah dengan tingkat pendidikan tertinggi tahun 2011-2012 diraih kota Magelang dan pada tahun 2013-2015 diraih Kota Surakarta. Sedangkan daerah dengan tingkat pendidikan terendah tahun 2011 adalah kabupaten Pemalang dan pada tahun 2012-2015 adalah kabupaten Brebes.

B. Uji Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan program *Eviews 8.0*. Kelebihan yang dimiliki oleh program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data menjadi lebih mudah termasuk dalam mengolah data panel.

Berdasarkan proses uji yang peneliti lakukan, yaitu *Uji Chow* dan *Uji Hausman* diperoleh model yang tepat yaitu *Uji Fixed Effect*.

1. Pemilihan Model Terbaik

Penelitian model terbaik digunakan untuk mengetahui model terbaik antara *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang akan digunakan dalam menganalisis variabel-variabel penelitian.

a. Uji Chow

Signifikansi model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan *Uji Chow*.

Hipotesis :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Penelitian ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05) dengan ketentuan menolak H_0 jika nilai *p-value* < *alpha*. Hasil pengujian menggunakan *Eviews 8.0* diperoleh hasil sebagai berikut :

Table 4.5
Uji Chow

<i>Chow Test</i>	
<i>Prob.Chi Square</i>	0,0000
Model Terpilih	<i>Fixed Effect</i>

Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *eviews 8.0* yang terdapat pada lampiran VII, diperoleh *p-value cross section/ period chi square* $0,0000 < \alpha$ (0,05) atau nilai *probability (p value) F test*

$0,0000 < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya model yang tepat adalah model fixed effect.

b. Uji Hausman

Signifikansi model *fixed effect* dan *random effect* dapat dilakukan dengan *Uji Hausman*.

Hipotesis :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Penelitian ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05) dengan ketentuan menolak H_0 jika nilai *p-value period random* $< \alpha$. Hasil pengujian menggunakan *evIEWS 8.0* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Hausman

<i>Hausman Test</i>	
<i>Prob. Chi Square</i>	0,0004
Model Terpilih	<i>Fixed Effect</i>

Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *evIEWS 8.0* yang terdapat pada lampiran IX, diperoleh *p-value period random* $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya model yang tepat adalah model *fixed effect*.

2. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari Deteksi Normalitas, Deteksi Heterokodastisitas, Deteksi Multikolinieritas, Deteksi Autokorelasi.

a. Deteksi Normalitas

Berdasarkan olahan *software Eviews 8.0* yang terdapat pada lampiran 10, diperoleh hasil *p-value Jarque Bera* sebesar $5.544399 > \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima yang artinya data berdistribusi normal.

b. Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Penelitian ini menggunakan *Uji White* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Varians error* bersifat homokedastisitas

H_1 : *Varians error* bersifat heterokedastisitas

Tabel 4.7
Deteksi heterokedastisitas

<i>Obs* R square</i>	60,61563
<i>Prob Chi Square</i>	0,0000

Data diolah peneliti

Berdasarkan metode *White* yang dilakukan dengan menggunakan *Software E Views 8.0* pada tabel di atas menunjukkan bahwa *p-value prob chi square* sebesar $0,0000 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh heterokedastisitas.

c. Deteksi Multikolinieritas

Deteksi Multikolinieritas dalam penelitian ini diolah menggunakan *Software E Views 8.0*. Hasil olahan data sebagai berikut :

Table 4.8
Deteksi Multikolinieritas

Variabel	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
Upah	0,042715	3990.487	1.109361
Bantuan sosial	0,001655	442.1588	1.182083
Tingkat pendidikan	0,088106	171.9851	1.251296

Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.8 nilai VIF tidak ada yang di atas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah mutikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

d. Deteksi Autokorelasi

Berdasarkan data yang diolah menggunakan *Software E Views 8.0* dengan model *Breusch Godfrey*, diperoleh hasil deteksi autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Deteksi Autokorelasi

<i>F statistic</i>	145.4578
<i>Obs R*Squared</i>	110.6947
<i>Prob F</i>	0,0000
<i>Prob Chi Square</i>	0,0000

Data diolah peneliti

Table 4.9 menunjukkan hasil bahwa nilai Prob. F sebesar $0,0000 < \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi.

Autokorelasi dalam penelitian ini terjadi karena kemiskinan pada saat ini dipengaruhi oleh kemiskinan pada tahun sebelumnya.

3. Persamaan Regresi

Pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif antara upah (X_1), bantuan sosial (X_2), dan tingkat pendidikan (X_3) terhadap kemiskinan (Y). Analisis ini digunakan karena jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Table 4.10
Persamaan Regresi

Variabel	C	Upah	Bantuan sosial	Tingkat pendidikan
<i>Coefficient</i>	14,13353	-0,126164	0,014819	-0,599224
<i>Probability</i>	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002

Data diolah peneliti

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{LnKMS = 14,134 - 0,126LnUP + 0,015LnBS - 0,599LnTP}$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh menggambarkan hasil bahwa variabel upah bernilai negatif terhadap kemiskinan, bantuan sosial bernilai positif terhadap kemiskinan, dan tingkat pendidikan bernilai negatif terhadap kemiskinan.

Setelah diperoleh persamaan regresi dari hasil perhitungan model yang terpilih, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menyatakan ada

tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdiri dari uji keberartian regresi secara parsial dan simultan serta uji koefisien determinasi.

4. Spesifikasi fixed effect

Berdasarkan lampiran VI, dapat diketahui spesifikasi efek individual dari kemiskinan disetiap kabupaten kota Jawa Tengah. Hasil spesifikasi *fixed effect* sebagai berikut :

Tabel 4.11
Spesifikasi Fixed Effect

_KABCILACAP—C	14,931	_KABKUDUS—C	13,711
_KABBANYUMAS—C	15,147	_KABJEPARA—C	14,084
_KABPURBALINGGA—C	14,606	_KABDEMAK—C	14,625
_KABBANJARNEGARA—C	14,437	_KABSEMARANG--C	13,922
_KABKEBUMEN—C	14,906	_KABTEMANGGUNG—C	13,848
_KABPURWOREJO—C	14,167	_KABKENDAL—C	14,165
_KABWONOSOBO—C	14,5	_KABBATANG--C	13,806
_KABMAGELANG—C	14,563	_KABPEKALONGAN--C	14,139
_KABBOYOLALI—C	14,262	_KABPEMALANG--C	14,803
_KABKLATEN—C	14,691	_KABTEGAL—C	14,322
_KABSUKOHARJO—C	13,961	_KABBREBES--C	15,183
_KABWONOGIRI—C	14,245	_KOTAMAGELANG--C	12,147
_KABKARANGANYAR—C	14,248	_KOTASURAKARTA--C	13,799
_KABSRAGEN—C	14,322	_KOTASALATIGA--C	12,101
_KABGROBOGAN—C	14,658	_KOTASEMARANG--C	14,14
_KABBLORA—C	14,154	_KOTAPEKALONGAN—C	12,767
_KABREMBANG—C	14,255	_KOTATEGAL--C	12,626
_KABPATI—C	14,436		

Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi spesifikasi efek individual masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan hasil spesifikasi

efek individual yaitu kabupaten Brebes sebesar 15,183. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terendah berdasarkan hasil spesifikasi efek individual yaitu pada kota Salatiga sebesar 12,10.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%.

Table 4.12
Hasil uji t

Variabel	Upah	Bantuan sosial	Tingkat pendidikan
<i>Coeffisien</i>	-0,126164	0,014819	-0,599224
t-hitung	-5,637273	4,065307	-3,876790
t-tabel	1,65381		
<i>Probability</i>	0,0000	0,0001	0,0002

Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan *Eviews 8.0*, nilai t_{hitung} upah adalah sebesar 5,637273 dibandingkan dengan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 175-3-1 = 171, hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 1,65381. Hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (5,637273) > t_{tabel} (1,65381) yang berarti bahwa upah memiliki pengaruh terhadap

- kemiskinan. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari upah $(0,0000) < (0,05)$. Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel bantuan sosial terlihat bahwa $t_{hitung} (4,065307) > t_{tabel} (1,65381)$ yang berarti bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari bantuan sosial $(0,0001) < (0,05)$. Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
 3. Berdasarkan hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel tingkat pendidikan terlihat bahwa $t_{hitung} (3,876790) > t_{tabel} (1,65381)$ yang berarti bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari tingkat pendidikan $(0,0002) < (0,05)$. Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

b. Uji Keberartian Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat

nilai probabilitas signifikansi. Selain itu dapat juga menggunakan perhitungan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas.

Dari tabel nilai kritis distribusi F dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha=5\%$, dan nilai $df_1 = 3$ dan $df_2 = 171$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,66.

Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji F

F-hitung	2209,481
F-tabel	2,66
<i>Prob F Statistic</i>	0,000000

Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa F_{hitung} yang lebih besar daripada F_{tabel} ($2209,481 > 2,66$) serta nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.

c. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil output *Eviews.8.0* diperoleh nilai R^2 sebesar 0,99, artinya semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Salah satu sifat penting dari R^2 adalah semakin banyak jumlah variabel

bebas dalam suatu model, maka akan semakin tinggi nilai R^2 . Perlu diketahui pada model *fixed effect*, terdapat *individual effect* yang berkorelasi dengan variabel bebas untuk mengakomodir heterogenitas yang terjadi antar individu ataupun *cross section* nya. Setiap efek individu tersebut merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik *dummy variable (LSDV)*. Implikasi dari pengestimasi efek individu tersebut yang menyebabkan R^2 jadi membesar. *Adjusted R²* yang dihasilkan pada *model fixed effect* dapat dikatakan semua dikarenakan variasi dari variabel *dependen* pada model juga dijelaskan oleh efek individu (variabel *dummy* pada model *fixed effect*) yang kemungkinan besar menangkap variabel-variabel lain di luar model penelitian. Konsekuensi dari pemilihan model *fixed* adalah kita memasukkan banyak *dummy* yang akan mengurangi *degree of freedom* (df). Sehingga inilah yang menyebabkan R^2 pada model *fixed effect* pada data panel akan cenderung tinggi hampir mendekati 1 (satu) dan dianggap semua.

C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah, bantuan sosial dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan estimasi model *fixed effect* sebagai model terbaik dan analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{LnKMS} = 14,134 - 0,126\text{LnUP} + 0,015\text{LnBS} - 0,599\text{LnTP}$$

Pembahasan dari masing-masing persamaan adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Upah Terhadap Kemiskinan

Hasil persamaan regresi memiliki nilai konstanta sebesar 14,134 yang menunjukkan bahwa ketika upah adalah konstan, maka nilai kemiskinan sebesar 14,134 persen. Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa upah memiliki angka koefisien sebesar -0,126 yang menunjukkan bahwa apabila upah turun sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya bersifat *ceteris paribus*, maka jumlah kemiskinan akan meningkat sebesar 12,6 persen.

Angka koefisien upah bernilai negatif, artinya upah yang menurun akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan yang menyimpulkan bahwa variabel upah berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan⁶⁴.

Upah menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui upah, seseorang dapat membeli barang/jasa yang dibutuhkannya. Upah provinsi Jawa Tengah tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan besarnya upah yang akan ditetapkan. Upah yang ditetapkan oleh pemerintah sebaiknya

⁶⁴Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, dan Deny Setiawan, *op.cit*, h.9

disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok yang sedang berlaku. Sehingga, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Hasil persamaan regresi memiliki nilai konstanta sebesar 14,134 yang menunjukkan bahwa apabila bantuan sosial adalah konstan, maka jumlah kemiskinan sebesar 14,134 persen. Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa bantuan sosial memiliki angka koefisien sebesar 0,015. Angka koefisien bantuan sosial bernilai positif, artinya bantuan sosial yang meningkat akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Amalia, Madris, dan Abd.Rahman Razak yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan jumlah kemiskinan⁶⁵.

Bantuan sosial kurang berjalan efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan bantuan sosial bersifat pasif yang hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, agar bantuan sosial yang diberikan dapat berjangka panjang dan dapat mengubah masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, maka bantuan sosial

⁶⁵Rahmah Amalia, Madris, dan Abd.Rahman Razak, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat", *Jurnal Analisis*, Vol 4, No.2 :183-189, Desember 2015

harus disandingkan dengan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya lainnya.⁶⁶

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah daerah Jawa Tengah adalah berupa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai gerakan stabilisasi pangan, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan kesejahteraan lainnya.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Meningkatnya jumlah kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya dana bantuan sosial, menggambarkan bahwa dana bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Penerima bantuan sosial bukan dari kalangan tidak mampu melainkan mereka yang kebutuhan ekonominya tercukupi.

Selain itu, sebagian besar bantuan sosial yang diberikan hanya berfokus pada penyaluran dana bukan pemberdayaan. Sehingga dana tersebut dapat menimbulkan ketergantungan. Bantuan sosial yang diperoleh masyarakat seringkali disalahgunakan untuk membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Bantuan sosial seharusnya digunakan sebagai modal untuk membangun usaha sehingga pendapatan yang diperoleh akan bertambah dan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan.

Pemerintah dapat memfokuskan pemberian bantuan sosial tunai atau non tunai untuk penduduk usia non produktif, seperti wanita lanjut usia yang kebutuhan ekonominya tidak tercukupi. Sementara itu, pemberian

⁶⁶ Nazim N.Habibov and Lida Fan, "Sosial Assistance And The Challenges Of Poverty And Inequality In Azerjaiban, A Low-Income Country In Transition", *The Journal of Sociology and Social Welfare*, Vol.3 No.1, Maret 2006

bantuan sosial untuk penduduk usia produktif dapat berupa kegiatan pelatihan atau pemberdayaan masyarakat melalui pendirian usaha rakyat. Sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana bantuan sosial, agar dana yang diberikan tepat sasaran.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Hasil persamaan regresi memiliki konstanta sebesar 14,134 yang menunjukkan bahwa ketika tingkat pendidikan adalah konstan, maka nilai kemiskinan sebesar 14,134 persen. Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan memiliki angka koefisien sebesar -0,599, angka koefisien tingkat pendidikan merupakan angka koefisien yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

Angka koefisien tingkat pendidikan yaitu sebesar -0,599 menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan turun sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya bersifat *ceteris paribus*, maka jumlah kemiskinan akan meningkat sebesar 59,9 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka yang menyimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin⁶⁷. Peningkatan tingkat pendidikan

⁶⁷ I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, *op.cit*, h.7

menjadi salah satu faktor penting yang dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan pencapaian pendidikan dapat menumbuhkan keahlian dan keterampilan yang membuka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, sehingga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.⁶⁸

Tingkat pendidikan di provinsi Jawa Tengah tergolong masih sangat rendah. Sebagian besar penduduknya hanya menempuh pendidikan dasar. Sehingga ilmu yang diperoleh sangat sedikit. Pemerintah harus berupaya mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan tingkat pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dapat melalui penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan, membebaskan biaya sekolah bagi masyarakat kurang mampu, memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi mereka yang membutuhkan dan membangun fasilitas yang menunjang pendidikan, seperti gedung sekolah dan akses jalan menuju sekolah. Selain itu pemerintah juga dapat mendirikan pelatihan keterampilan sebagai nilai tambah bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

⁶⁸ Masood Sarwar Awan, dkk, "Impact Of Education On Poverty Reduction", *Paper University Islamabad*, No 31826, Juni 2011

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat “Pengaruh Antara Upah, Bantuan Sosial dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 35 kab/kota Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga tahun 2015.
2. Bantuan Sosial memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga tahun 2015.
3. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga tahun 2015.
4. Upah, bantuan sosial, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, implikasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Artinya tingkat upah yang rendah akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan upah menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jika upah yang diterima jumlahnya sedikit maka masyarakat akan sulit untuk membeli kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan.
2. Bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Artinya bantuan sosial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun, meningkatnya dana bantuan sosial berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Hal ini dikarenakan dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran dan kualitas penggunaan bantuan sosial yang dilakukan masyarakat kurang baik.
3. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Artinya, tingkat pendidikan yang rendah akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan menjadi akses untuk mendapatkan pekerjaan.

C. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi hendaknya meningkatkan upah sesuai dengan harga kebutuhan barang/jasa yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat upah di provinsi Jawa Tengah paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa.
2. Pemerintah provinsi sebaiknya mengawasi pengalokasian dana yang diberikan kepada masyarakat sehingga dana tepat sasaran dan memfokuskan pemberian dana untuk masyarakat dalam usia tidak produktif sedangkan untuk masyarakat dalam usia produktif diberikan pemberdayaan agar masyarakat usia produktif dapat mengembangkan potensinya.
3. Pemerintah provinsi sebaiknya menaikkan tingkat pendidikan melalui pembebasan dana sekolah dan pemberian perlengkapan sekolah secara gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta membangun atau memperbaiki fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, dan akses jalan menuju sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Moch.Doddy. *Ekonometrika : Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. Jakarta : Erlangga. 2007.
- Amalia, Rahmah, Madris, dan Abd.Rahman Razak,"*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat*", **Jurnal Analisis**,Vol.4 No.2 Desember 2015
- Ansofino, dkk. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Aris, Budi. *Indef sebut Jateng Belum Mampu Mengoptimalkan Potensi Daerahnya* (<https://www.radioidola.com> (Diakses pada tanggal 20 November 2017))
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Daerah : Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : BPF. 2016.
- _____. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2015.
- Awan, Masood Sarwar, dkk,"*Impact Of Education On Poverty Reduction*", **Paper University Islamabad**, No 31826, Juni 2011
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2012.
- Faqih, Achmad. *Kependudukan : Teori, Fakta, dan Masalah*. Yogyakarta : Deepublish
- Gujarati, Damodar N. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga. 2006
- Gumelar, Galih. *Upah Rendah, Jawa Tengah Diincar Perusahaan Padat Karya*. <https://www.Cnnindonesia.com> (diakses pada tanggal 20 November 2017)
- Gunawan,dkk, *Kemiskinan : Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta : IMPAC. 1999
- Habibov, Nazim N. and Lida Fan,"*Sosial Assistance And The Challenges Of Poverty And Inequality In Azerjaiban, A Low-Income Country In Transition*",**The Journal of Sociology and Social Welfare**,Vol.3 No.1, Maret 2006
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.

- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO. 1996.
- Kemiskinan di Indonesia*. <https://www.adb.org>. (Diakses pada tanggal 20 April 2017)
- Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id>. (Diakses pada tanggal 11 Februari 2017)
- Khomsan, Ali et al. *Indikator kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Laily, Nur dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013
- Lince, Ester. *Pemerintah Daerah Harus Perkuat Wajib Belajar 12 Tahun*. <http://edukasi.kompas.com>. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2015)
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia : Pasca Reformasi*. Jakarta : Erlangga. 2016.
- Maipita, Indra, "Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan", **Jurnal Ekonomi dan Keuangan**, Vol.17 No.3 September 2013
- Mankiw, N. Gregory. *Makro Ekonomi*. Jakarta :Erlangga. 2006.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : LPFE UI. 2006
- _____. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : PT Raja Grafindo.2002
- Pernando, Anggara *BKPM Ingatkan Potensi Besar yang Dimiliki Jawa Tengah*. <http://semarang.bisnis.com>.(Diakses pada tanggal 20 November 2017)
- Profil Dana Bantuan Sosial*. <http://ehibahbansos.bantenprov.go.id>. (Diakses pada tanggal 30 Juli 2017)
- Purba, Agustinus. *Musrenbangwil Jateng : bappeda petakan 9 masalah untuk segera diatasi*. <http://beritadaerah.co.id>. (Diakses pada tanggal 12 Februari 2017)
- Putri, I.A Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Beberapa faktor yang mempegaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Bali", **E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana**, Vol.2 No.10 Oktober 2013

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*
- Riva, Vinny Alvionita, et. all, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau", **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**, Vol.1 No.2, Oktober 2014
- Rusnani, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep", **Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi**, Vol.5 No.1 Maret 2015
- Rusna, Liliy. *Angka Kemiskinan Meningkat Tembus 28.51 Juta Orang*. Sindonews. <http://ekbis.sindo news.com>. (Diakses pada tanggal 20 Juli 2017)
- Rosadi, Dedi. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan EVIEWS*. Yogyakarta : CV Andi Offset. 2012
- Saifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta : Deepublish. 2014
- Solikodin, Moh. et.all. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Tangerang : PT Pustaka Mandiri. 2015.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011
- _____. *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015.
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia. 1984
- Sihombing, Martin *Garis Kemiskinan di Indonesia Naik 2,78*. (<http://finansial.bisnis.com>. (Diakses pada tanggal 14 Desember 2017))
- Suwandi. *Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta : Deepublish. 2015
- Syafi, Fully. *Orang Miskin Jawa Timur terbanyak di Indonesia*. <https://m.tempo.co>. (Diakses pada tanggal 20 April 2017)
- Tambunan, Tulus T,H. *Perekonomian Indonesia*. Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga. 2006

Upah. <https://www.bps.go.id>. (Diakses pada tanggal 11 Maret 2017)

Utama, Sampurna Budi dan Nur Aisyah Kustiani, "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Desentralisasi Fiskal", **Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, Desember 2012

Wiangga, Lingga Sukatma. *Tingkat Pendidikan Rendah, Pemprov Jateng Pacu Budaya Literasi* <http://kabar24.bisnis.com> (diakses pada tanggal 20 November 2017)

Widarjono, Agus. *Ekonometrika*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2013

Widiastuti, Aris Wasita. *Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Naik*. <http://www.antaraneews.com>. (Diakses pada tanggal 17 Juli 2017)

Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2009

Wirawan, I Made Tony dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali", **E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana**, Vol.4 No.5 Mei 2015

World Development Report. *Pertanian untuk Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat. 2008

Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan A.A.I.N. Marhaeni, "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali", **Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Vol.11 No.2 Desember 2015

Lampiran 1
Data kemiskinan (Jiwa)

kab/kota jateng	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	282000	260900	255700	239800	243500
Kabupaten Banyumas	328500	303900	296800	283500	285900
Kabupaten Purbalingga	196000	181300	181100	176000	176500
Kabupaten Banjarnegara	177300	164000	166800	159500	165400
Kabupaten Kebumen	279400	258500	251100	242300	241900
Kabupaten Purworejo	121900	112800	109000	102100	101200
Kabupaten Wonosobo	183000	169300	170100	165800	166400
Kabupaten Magelang	179600	166200	171000	160500	162400
Kabupaten Boyolali	139500	129100	126500	118600	120000
Kabupaten Klaten	203100	187900	179500	168200	172300
Kabupaten Sukoharjo	92000	85100	84100	78900	79900
Kabupaten Wonogiri	146400	135400	132200	123800	123000
Kabupaten Karanganyar	124500	115200	114400	107300	106400
Kabupaten Sragen	154300	142800	139000	130300	130400
Kabupaten Grobogan	227800	210800	199000	186500	184500
Kabupaten Blora	134900	124800	123800	116000	115000
Kabupaten Rembang	140400	129900	128000	120000	119100
Kabupaten Pati	175100	162000	157900	148100	147100
Kabupaten Kudus	73600	68100	70100	65800	64100
Kabupaten Jepara	113300	104800	106900	100500	100600
Kabupaten Demak	192500	178100	172500	162000	160900
Kabupaten Semarang	96000	88800	83200	79800	81200
Kabupaten Temanggung	94900	87800	91100	85500	87500
Kabupaten Kendal	128600	119000	117700	110500	109300
Kabupaten Batang	95300	88200	87500	82100	83500
Kabupaten Pekalongan	125900	116500	116500	109300	112100
Kabupaten Pemasang	261200	241700	246800	237000	235500
Kabupaten Tegal	161100	149000	149800	140300	143500
Kabupaten Brebes	394400	364900	367900	355100	352000
Kota Magelang	13100	12100	11800	11000	10900
Kota Surakarta	64500	59700	59700	55900	55700
Kota Salatiga	13300	12300	11500	10800	10600
Kota Semarang	88500	81900	86700	84700	84300
Kota Pekalongan	28300	26800	24100	23600	24100
Kota Tegal	25900	24000	21600	20900	20300

Sumber : bps prov Jateng

Lampiran 2
Data Upah Riil (Rupiah)

kab/kota jateng	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Cilacap	559579	565472	599208	838973	961379
Kab. Banyumas	585892	592974	603259	852079	914229
Kab. Purbalingga	601084	617829	617594	834898	884748
Kab. Banjarnegara	571294	572605	576817	787739	925079
Kab. Kebumen	534259	540427	530563	835762	964182
Kab. Purworejo	571926	591201	579087	572183	708035
Kab. Wonosobo	626516	642123	629426	854848	980244
Kab. Magelang	633886	669849	669462	977680	1028099
Kab. Boyolali	656417	662703	655678	955152	999333
Kab. Klaten	608824	622604	619183	875789	973135
Kab. Sukoharjo	631087	645730	637276	977559	1012417
Kab. Wonogiri	578814	594143	585910	813022	918648
Kab. Karanganyar	627250	641006	624913	893836	1009552
Kab. Sragen	607271	623893	618778	828729	925693
Kab. Grobogan	564213	576782	573491	769864	924524
Kab. Blora	640911	646636	652661	872385	992013
Kab. Rembang	595785	615431	632233	823166	911681
Kab. Pati	603805	632314	651039	862812	970710
Kab. Kudus	661574	668321	687118	926224	1076191
Kab. Jepara	571213	576784	584424	816526	897946
Kab. Demak	673861	681679	701841	1081995	1274494
Kab. Semarang	696368	712578	735737	1031856	1178278
Kab. Temanggung	620025	658105	667566	895293	977593
Kab. Kendal	674784	686976	652183	1019356	1123295
Kab. Batang	640006	673813	687212	991178	1067048
Kab. Pekalongan	635543	653982	666020	982327	1033501
Kab. Pemasaran	570013	599305	644200	920712	995662
Kab. Tegal	562626	592488	587707	846382	943242
Kab. Brebes	541295	559324	564426	840619	951354
Kota Magelang	615611	630603	610731	876807	996954
Kota Surakarta	682966	694616	679401	979973	1020112
Kota Salatiga	675857	693702	696212	1005327	1077709
Kota Semarang	750564	738328	832198	1198939	1383756
Kota Pekalongan	656349	700759	714078	1025799	1098723

Kota Tegal	564386	592135	605421	909963	1011236
------------	--------	--------	--------	--------	---------

Lampiran 3
Data Dana Bantuan Sosial (Rupiah)

KAB/KOTA JATENG	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	27379187000	4674040000	3472600000	2585250000	2206018000
Kabupaten Banyumas	27101717000	7059350000	3546000000	9220644000	8121740000
Kabupaten Purbalingga	12497219000	7273379000	8446250000	8132729000	4432099977
Kabupaten Banjarnegara	30277110000	10192900000	10301440000	11610224000	7732320000
Kabupaten Kebumen	33933371000	23886913000	37679762000	26485323000	19675317418
Kabupaten Purworejo	11391857000	4471431000	8185000000	1229000000	882200000
Kabupaten Wonosobo	2004754000	3119980000	3023600000	3340356690	3088343256
Kabupaten Magelang	13442181000	2801150000	6400095000	12286824000	13332175000
Kabupaten Boyolali	33110161000	5070133000	3292630000	3204078000	8313969288
Kabupaten Klaten	31942550000	13607845000	11255817000	12085520000	10573200000
Kabupaten Sukoharjo	32967500000	7565132000	16297614000	14903500000	19474373000
Kabupaten Wonogiri	1804500000	4340000000	4278000000	6763000000	617500000
Kabupaten Karanganyar	36372884000	87245467000	7755700000	9366000000	9459000000
Kabupaten Sragen	22153438000	9936487000	26448300000	14870265000	20188850000
Kabupaten Grobogan	23609167000	12746595000	12807410000	7368471000	12710116756
Kabupaten Blora	33137047000	3200500000	4199500000	3962000000	6589000000
Kabupaten Rembang	35458168000	11945766000	1800500000	2552273000	2639000000
Kabupaten Pati	22541394000	14590460000	6069820000	6742313000	5485294000
Kabupaten Kudus	27328859000	26663285000	24098659000	32133595000	20244810000
Kabupaten Jepara	51252765000	18411600000	5601358000	7561890000	8807890000
Kabupaten Demak	66898584000	6077041000	3451490000	2791075000	3772420000
Kabupaten Semarang	13339993000	10660579000	6730575000	7161793000	92136800000
Kabupaten Temanggung	20885382000	14132312000	29564076000	17601445000	16220719040
Kabupaten Kendal	15952090000	6732083000	6017886000	1663750000	11830702625
Kabupaten Batang	8766946000	9154307000	50049360000	31458698000	15486936091
Kabupaten Pekalongan	23111909000	5738100000	9243350000	6328720000	4850200000
Kabupaten Pemalang	30513221000	12948250000	15584850000	23640515000	2120250000
Kabupaten Tegal	28790307000	9586949000	9606650000	16178667000	23708800000
Kabupaten Brebes	64564505000	29151390000	11227947000	16849270000	22769678000
Kota Magelang	6769465000	1592110000	3431286000	2885585000	891850000
Kota Surakarta	5891911000	91500000	197933000	57000000	1671875000
Kota Salatiga	6825816000	498857000	1234885000	668360000	5411950000
Kota Semarang	10534163500	7485437000	2731600000	6301500000	2277000000

Kota Pekalongan	3271660000	686300000	10135246000	13457324000	35076600000
Kota Tegal	28330157000	14065400000	17947008000	14276409000	690874460

Sumber : bps prov Jateng

Lampiran 4
Data Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

kab/kota jateng	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	6.27	6.28	6.43	6.48	6.58
Kabupaten Banyumas	6.94	7.06	7.18	7.31	7.31
Kabupaten Purbalingga	6.33	6.44	6.68	6.84	6.85
Kabupaten Banjarnegara	5.84	5.85	5.86	5.9	6.17
Kabupaten Kebumen	6.29	6.3	6.39	6.75	7.04
Kabupaten Purworejo	7.45	7.51	7.57	7.63	7.65
Kabupaten Wonosobo	5.87	5.9	5.92	6.07	6.11
Kabupaten Magelang	6.73	6.8	6.88	7.02	7.19
Kabupaten Boyolali	6.53	6.55	6.61	6.69	7.1
Kabupaten Klaten	7.35	7.43	7.74	7.92	8.16
Kabupaten Sukoharjo	7.94	8.09	8.25	8.41	8.5
Kabupaten Wonogiri	5.66	6.03	6.12	6.23	6.39
Kabupaten Karanganyar	7.46	7.8	8.38	8.47	8.48
Kabupaten Sragen	6.26	6.28	6.69	6.85	6.86
Kabupaten Grobogan	6.18	6.23	6.25	6.32	6.33
Kabupaten Blora	5.77	5.83	5.9	6.02	6.04
Kabupaten Rembang	6.28	6.41	6.7	6.9	6.92
Kabupaten Pati	6.11	6.15	6.27	6.35	6.71
Kabupaten Kudus	7.48	7.6	7.73	7.83	7.84
Kabupaten Jepara	6.72	6.96	7.09	7.29	7.31
Kabupaten Demak	6.75	6.88	7.22	7.44	7.45
Kabupaten Semarang	7.2	7.24	7.28	7.31	7.33
Kabupaten Temanggung	6.03	6.08	6.13	6.18	6.52
Kabupaten Kendal	6.24	6.36	6.42	6.53	6.64
Kabupaten Batang	5.66	5.7	5.88	6	6.41
Kabupaten Pekalongan	6.04	6.15	6.37	6.53	6.55
Kabupaten Pemalang	5.19	5.51	5.72	5.87	6.04
Kabupaten Tegal	5.71	5.78	5.85	5.93	6.3
Kabupaten Brebes	5.24	5.38	5.68	5.86	5.88
Kota Magelang	10.14	10.2	10.22	10.27	10.28

Kota Surakarta	10.05	10.11	10.25	10.33	10.36
Kota Salatiga	8.97	9.09	9.2	9.37	9.81
Kota Semarang	9.8	9.92	10.06	10.19	10.2
Kota Pekalongan	7.72	7.8	7.96	8.12	8.28
Kota Tegal	7.66	7.85	8.05	8.26	8.27

Lampiran 5

Common Effect

Dependent Variable: LOG(KMS?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/10/17 Time: 13:57
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.13747	3.004579	5.370960	0.0000
LOG(UP?)	0.056338	0.206676	0.272590	0.7855
LOG(BS?)	0.040375	0.040685	0.992380	0.3224
LOG(TP?)	-3.195354	0.296826	-10.76506	0.0000
R-squared	0.473868	Mean dependent var		11.60043
Adjusted R-squared	0.464637	S.D. dependent var		0.799464
S.E. of regression	0.584955	Akaike info criterion		1.788030
Sum squared resid	58.51155	Schwarz criterion		1.860368
Log likelihood	-152.4526	Hannan-Quinn criter.		1.817372
F-statistic	51.33777	Durbin-Watson stat		0.019201
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(KMS?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/10/17 Time: 13:58
 Sample: 2011 2015
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.13353	0.234912	60.16531	0.0000
LOG(UP?)	-0.126164	0.022380	-5.637273	0.0000
LOG(BS?)	0.014819	0.003645	4.065307	0.0001
LOG(TP?)	-0.599224	0.154567	-3.876790	0.0002
Fixed Effects (Cross)				
_KABCILACAP--C	0.797518			
_KABBANYUMAS--C	1.013191			
_KABPURBALINGGA--C	0.472274			
_KABBANJARNEGARA--C	0.303736			
_KABKEBUMEN--C	0.772625			
_KABPURWOREJO--C	0.033012			
_KABWONOSOBO--C	0.366932			
_KABMAGELANG--C	0.429290			
_KABBOYOLALI--C	0.128451			
_KABKLATEN--C	0.557071			
_KABSUKOHARJO--C	-0.172817			
_KABWONOGIRI--C	0.111369			
_KABKARANGANYAR--C	0.114180			
_KABSRAGEN--C	0.188505			
_KABGROBOGAN--C	0.524294			
_KABBLORA--C	0.020171			
_KABREMBANG--C	0.120973			
_KABPATI--C	0.302388			
_KABKUDUS--C	-0.422095			
_KABJEPARA--C	-0.049995			
_KABDEMAK--C	0.491573			
_KABSEMARANG--C	-0.211377			
_KABTEMANGGUNG--C	-0.285756			
_KABKENDAL--C	0.031738			
_KABBATANG--C	-0.327819			
_KABPEKALONGAN--C	0.005099			
_KABPEMALANG--C	0.669082			
_KABTEGAL--C	0.188076			
_KABBREBES--C	1.049492			
_KOTAMAGELANG--C	-1.986034			
_KOTASURAKARTA--C	-0.334292			
_KOTASALATIGA--C	-2.032910			
_KOTASEMARANG--C	0.006195			
_KOTAPEKALONGAN--C	-1.366994			

_KOTATEGAL--C -1.507146

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998327	Mean dependent var	11.60043
Adjusted R-squared	0.997875	S.D. dependent var	0.799464
S.E. of regression	0.036852	Akaike info criterion	-3.574321
Sum squared resid	0.186058	Schwarz criterion	-2.887110
Log likelihood	350.7531	Hannan-Quinn criter.	-3.295569
F-statistic	2209.481	Durbin-Watson stat	1.539859
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: ZANIA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1263.141742	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	1006.411325	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(KMS?)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/10/17 Time: 13:58

Sample: 2011 2015

Included observations: 5

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.13747	3.004579	5.370960	0.0000
LOG(UP?)	0.056338	0.206676	0.272590	0.7855
LOG(BS?)	0.040375	0.040685	0.992380	0.3224
LOG(TP?)	-3.195354	0.296826	-10.76506	0.0000
R-squared	0.473868	Mean dependent var		11.60043
Adjusted R-squared	0.464637	S.D. dependent var		0.799464
S.E. of regression	0.584955	Akaike info criterion		1.788030
Sum squared resid	58.51155	Schwarz criterion		1.860368
Log likelihood	-152.4526	Hannan-Quinn criter.		1.817372
F-statistic	51.33777	Durbin-Watson stat		0.019201
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8

Random Effect

Dependent Variable: LOG(KMS?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/10/17 Time: 13:58
 Sample: 2011 2015
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 175
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.20996	0.255335	55.65218	0.0000
LOG(UP?)	-0.109385	0.022006	-4.970671	0.0000
LOG(BS?)	0.014204	0.003640	3.901868	0.0001
LOG(TP?)	-0.747765	0.150342	-4.973764	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KABCILACAP--C	0.784594			
_KABBANYUMAS--C	1.016720			
_KABPURBALINGGA--C	0.464504			
_KABBANJARNEGARA —C	0.280454			
_KABKEBUMEN--C	0.764733			
_KABPURWOREJO--C	0.047245			
_KABWONOSOBO--C	0.342513			
_KABMAGELANG--C	0.426362			
_KABBOYOLALI--C	0.120789			
_KABKLATEN--C	0.571663			
_KABSUKOHARJO--C	-0.148736			
_KABWONOGIRI--C	0.090906			
_KABKARANGANYAR —C	0.136213			
_KABSRAGEN--C	0.180310			
_KABGROBOGAN--C	0.509253			
_KABBLORA--C	-0.005368			
_KABREMBANG--C	0.113445			
_KABPATI--C	0.287056			
_KABKUDUS--C	-0.408178			
_KABJEPARA--C	-0.046782			
_KABDEMAK--C	0.491641			
_KABSEMARANG--C	-0.207646			
_KABTEMANGGUNG— C	-0.303730			
_KABKENDAL--C	0.017530			
_KABBATANG--C	-0.353123			
_KABPEKALONGAN--C	-0.010859			
_KABPEMALANG--C	0.637469			
_KABTEGAL--C	0.164298			
_KABBREBES--C	1.017822			
_KOTAMAGELANG--C	-1.928960			
_KOTASURAKARTA--C	-0.281093			
_KOTASALATIGA--C	-1.992111			
_KOTASEMARANG--C	0.055056			
_KOTAPEKALONGAN—	-1.348621			

C			
_KOTATEGAL--C	-1.485369		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.602520	0.9963
Idiosyncratic random		0.036852	0.0037
Weighted Statistics			
R-squared	0.616777	Mean dependent var	0.317190
Adjusted R-squared	0.610053	S.D. dependent var	0.061597
S.E. of regression	0.038465	Sum squared resid	0.253001
F-statistic	91.73835	Durbin-Watson stat	1.146157
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.208353	Mean dependent var	11.60043
Sum squared resid	88.03968	Durbin-Watson stat	0.003294

Lampiran 9

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: ZANIA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.291995	3	0.0004

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(UP?)	-0.126164	-0.109385	0.000017	0.0000
LOG(BS?)	0.014819	0.014204	0.000000	0.0010
LOG(TP?)	-0.599224	-0.747765	0.001288	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(KMS?)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/10/17 Time: 13:59

Sample: 2011 2015

Included observations: 5

Cross-sections included: 35

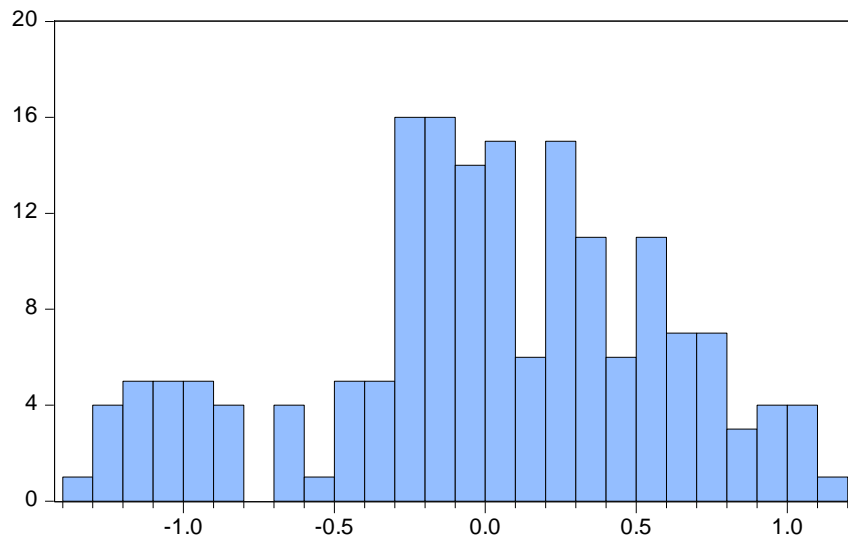
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.13353	0.234912	60.16531	0.0000
LOG(UP?)	-0.126164	0.022380	-5.637273	0.0000
LOG(BS?)	0.014819	0.003645	4.065307	0.0001
LOG(TP?)	-0.599224	0.154567	-3.876790	0.0002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998327	Mean dependent var	11.60043
Adjusted R-squared	0.997875	S.D. dependent var	0.799464
S.E. of regression	0.036852	Akaike info criterion	-3.574321
Sum squared resid	0.186058	Schwarz criterion	-2.887110
Log likelihood	350.7531	Hannan-Quinn criter.	-3.295569
F-statistic	2209.481	Durbin-Watson stat	1.539859
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10**Deteksi Normalitas**

Series: Residuals
Sample 1 175
Observations 175

Mean -2.01e-15
Median 0.008591
Maximum 1.124668
Minimum -1.302227
Std. Dev. 0.579891
Skewness -0.408212
Kurtosis 2.693690

Jarque-Bera 5.544399
Probability 0.062524

Lampiran 11**Deteksi Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	9.715371	Prob. F(9,165)	0.0000
Obs*R-squared	60.61563	Prob. Chi-Square(9)	0.0000
Scaled explained SS	49.01227	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/10/17 Time: 14:30

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.977032	137.5660	0.036179	0.9712
LOG(UP)^2	0.190406	0.745612	0.255369	0.7988
LOG(UP)*LOG(BS)	-0.011529	0.116859	-0.098657	0.9215
LOG(UP)*LOG(TP)	0.055777	0.936072	0.059587	0.9526
LOG(UP)	-5.076136	19.89810	-0.255107	0.7990
LOG(BS)^2	-0.028613	0.017034	-1.679799	0.0949
LOG(BS)*LOG(TP)	-0.298895	0.205298	-1.455904	0.1473
LOG(BS)	2.038387	1.896138	1.075020	0.2839
LOG(TP)^2	0.428322	1.184369	0.361646	0.7181
LOG(TP)	5.807065	13.77608	0.421533	0.6739
R-squared	0.346375	Mean dependent var		0.334352
Adjusted R-squared	0.310723	S.D. dependent var		0.436380
S.E. of regression	0.362295	Akaike info criterion		0.862728
Sum squared resid	21.65748	Schwarz criterion		1.043573
Log likelihood	-65.48867	Hannan-Quinn criter.		0.936083
F-statistic	9.715371	Durbin-Watson stat		0.453652
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 12**Deteksi Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors

Date: 08/10/17 Time: 14:35

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.027496	4617.000	NA
LOG(UP)	0.042715	3990.487	1.109361
LOG(BS)	0.001655	442.1588	1.182083
LOG(TP)	0.088106	171.9851	1.251296

Lampiran 13**Deteksi Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	145.4578	Prob. F(2,169)	0.0000
Obs*R-squared	110.6947	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/10/17 Time: 14:35

Sample: 1 175

Included observations: 175

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.302355	1.846833	-0.705183	0.4817
LOG(UP)	0.084322	0.126354	0.667349	0.5055
LOG(BS)	0.005394	0.025123	0.214699	0.8303
LOG(TP)	0.018500	0.181467	0.101949	0.9189
RESID(-1)	0.908729	0.076457	11.88552	0.0000
RESID(-2)	-0.141027	0.078005	-1.807919	0.0724

R-squared	0.632541	Mean dependent var	-2.01E-15
Adjusted R-squared	0.621670	S.D. dependent var	0.579891
S.E. of regression	0.356682	Akaike info criterion	0.809742
Sum squared resid	21.50058	Schwarz criterion	0.918249
Log likelihood	-64.85245	Hannan-Quinn criter.	0.853756
F-statistic	58.18313	Durbin-Watson stat	2.012975
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 14

Data Panel

	kab/kota jateng	tahun	KMS	UP	BS	TP
1	kab cilacap	2011	282000	559579	27379187000	6.27
1	kab cilacap	2012	260900	565472	4674040000	6.28
1	kab cilacap	2013	255700	599208	3472600000	6.43
1	kab cilacap	2014	239800	838973	2585250000	6.48
1	kab cilacap	2015	243500	961379	2206018000	6.58
2	kab banyumas	2011	328500	585892	27101717000	6.94
2	kab banyumas	2012	303900	592974	7059350000	7.06
2	kab banyumas	2013	296800	603259	3546000000	7.18
2	kab banyumas	2014	283500	852079	9220644000	7.31
2	kab banyumas	2015	285900	914229	8121740000	7.31
3	kab purbalingga	2011	196000	601084	12497219000	6.33
3	kab purbalingga	2012	181300	617829	7273379000	6.44
3	kab purbalingga	2013	181100	617594	8446250000	6.68
3	kab purbalingga	2014	176000	834898	8132729000	6.84
3	kab purbalingga	2015	176500	884748	4432099977	6.85
4	kab banjarnegara	2011	177300	571294	30277110000	5.84
4	kab banjarnegara	2012	164000	572605	10192900000	5.85
4	kab banjarnegara	2013	166800	576817	10301440000	5.86
4	kab banjarnegara	2014	159500	787739	11610224000	5.9
4	kab banjarnegara	2015	165400	925079	7732320000	6.17
5	kab kebumen	2011	279400	534259	33933371000	6.29
5	kab kebumen	2012	258500	540427	23886913000	6.3
5	kab kebumen	2013	251100	530563	37679762000	6.39
5	kab kebumen	2014	242300	835762	26485323000	6.75
5	kab kebumen	2015	241900	964182	19675317418	7.04
6	kab purworejo	2011	121900	571926	11391857000	7.45
6	kab purworejo	2012	112800	591201	4471431000	7.51
6	kab purworejo	2013	109000	579087	8185000000	7.57
6	kab purworejo	2014	102100	572183	1229000000	7.63
6	kab purworejo	2015	101200	708035	882200000	7.65
7	kab wonosobo	2011	183000	626516	2004754000	5.87
7	kab wonosobo	2012	169300	642123	3119980000	5.9
7	kab wonosobo	2013	170100	629426	3023600000	5.92
7	kab wonosobo	2014	165800	854848	3340356690	6.07
7	kab wonosobo	2015	166400	980244	3088343256	6.11
8	kab magelang	2011	179600	633886	13442181000	6.73

8	kab magelang	2012	166200	669849	2801150000	6.8
8	kab magelang	2013	171000	669462	6400095000	6.88
8	kab magelang	2014	160500	977680	12286824000	7.02
8	kab magelang	2015	162400	1028099	13332175000	7.19
9	kab boyolali	2011	139500	656417	33110161000	6.53
9	kab boyolali	2012	129100	662703	5070133000	6.55
9	kab boyolali	2013	126500	655678	3292630000	6.61
9	kab boyolali	2014	118600	955152	3204078000	6.69
9	kab boyolali	2015	120000	999333	8313969288	7.1
10	kab klaten	2011	203100	608824	31942550000	7.35
10	kab klaten	2012	187900	622604	13607845000	7.43
10	kab klaten	2013	179500	619183	11255817000	7.74
10	kab klaten	2014	168200	875789	12085520000	7.92
10	kab klaten	2015	172300	973135	10573200000	8.16
11	kab sukoharjo	2011	92000	631087	32967500000	7.94
11	kab sukoharjo	2012	85100	645730	7565132000	8.09
11	kab sukoharjo	2013	84100	637276	16297614000	8.25
11	kab sukoharjo	2014	78900	977559	14903500000	8.41
11	kab sukoharjo	2015	79900	1012417	19474373000	8.5
12	kab wonogiri	2011	146400	578814	1804500000	5.66
12	kab wonogiri	2012	135400	594143	4340000000	6.03
12	kab wonogiri	2013	132200	585910	4278000000	6.12
12	kab wonogiri	2014	123800	813022	6763000000	6.23
12	kab wonogiri	2015	123000	918648	617500000	6.39
13	kab Karanganyar	2011	124500	627250	36372884000	7.46
13	kab Karanganyar	2012	115200	641006	87245467000	7.8
13	kab Karanganyar	2013	114400	624913	7755700000	8.38
13	kab Karanganyar	2014	107300	893836	9366000000	8.47
13	kab Karanganyar	2015	106400	1009552	9459000000	8.48
14	kab Sragen	2011	154300	607271	22153438000	6.26
14	kab Sragen	2012	142800	623893	9936487000	6.28
14	kab Sragen	2013	139000	618778	26448300000	6.69
14	kab Sragen	2014	130300	828729	14870265000	6.85
14	kab Sragen	2015	130400	925693	20188850000	6.86
15	kab Grobogan	2011	227800	564213	23609167000	6.18
15	kab Grobogan	2012	210800	576782	12746595000	6.23
15	kab Grobogan	2013	199000	573491	12807410000	6.25
15	kab Grobogan	2014	186500	769864	7368471000	6.32
15	kab Grobogan	2015	184500	924524	12710116756	6.33

16	kab blora	2011	134900	640911	33137047000	5.77
16	kab blora	2012	124800	646636	3200500000	5.83
16	kab blora	2013	123800	652661	4199500000	5.9
16	kab blora	2014	116000	872385	3962000000	6.02
16	kab blora	2015	115000	992013	6589000000	6.04
17	kab rembang	2011	140400	595785	35458168000	6.28
17	kab rembang	2012	129900	615431	11945766000	6.41
17	kab rembang	2013	128000	632233	1800500000	6.7
17	kab rembang	2014	120000	823166	2552273000	6.9
17	kab rembang	2015	119100	911681	2639000000	6.92
18	kab pati	2011	175100	603805	22541394000	6.11
18	kab pati	2012	162000	632314	14590460000	6.15
18	kab pati	2013	157900	651039	6069820000	6.27
18	kab pati	2014	148100	862812	6742313000	6.35
18	kab pati	2015	147100	970710	5485294000	6.71
19	kab kudus	2011	73600	661574	27328859000	7.48
19	kab kudus	2012	68100	668321	26663285000	7.6
19	kab kudus	2013	70100	687118	24098659000	7.73
19	kab kudus	2014	65800	926224	32133595000	7.83
19	kab kudus	2015	64100	1076191	20244810000	7.84
20	kab jepara	2011	113300	571213	51252765000	6.72
20	kab jepara	2012	104800	576784	18411600000	6.96
20	kab jepara	2013	106900	584424	5601358000	7.09
20	kab jepara	2014	100500	816526	7561890000	7.29
20	kab jepara	2015	100600	897946	8807890000	7.31
21	kab demak	2011	192500	673861	66898584000	6.75
21	kab demak	2012	178100	681679	6077041000	6.88
21	kab demak	2013	172500	701841	3451490000	7.22
21	kab demak	2014	162000	1081995	2791075000	7.44
21	kab demak	2015	160900	1274494	3772420000	7.45
22	kab semarang	2011	96000	696368	13339993000	7.2
22	kab semarang	2012	88800	712578	10660579000	7.24
22	kab semarang	2013	83200	735737	6730575000	7.28
22	kab semarang	2014	79800	1031856	7161793000	7.31
22	kab semarang	2015	81200	1178278	92136800000	7.33
23	kab temanggung	2011	94900	620025	20885382000	6.03
23	kab temanggung	2012	87800	658105	14132312000	6.08
23	kab temanggung	2013	91100	667566	29564076000	6.13
23	kab temanggung	2014	85500	895293	17601445000	6.18

23	kab temanggung	2015	87500	977593	16220719040	6.52
24	kab Kendal	2011	128600	674784	15952090000	6.24
24	kab Kendal	2012	119000	686976	6732083000	6.36
24	kab Kendal	2013	117700	652183	6017886000	6.42
24	kab Kendal	2014	110500	1019356	1663750000	6.53
24	kab Kendal	2015	109300	1123295	11830702625	6.64
25	kab batang	2011	95300	640006	8766946000	5.66
25	kab batang	2012	88200	673813	9154307000	5.7
25	kab batang	2013	87500	687212	50049360000	5.88
25	kab batang	2014	82100	991178	31458698000	6
25	kab batang	2015	83500	1067048	15486936091	6.41
26	kab pekalongan	2011	125900	635543	23111909000	6.04
26	kab pekalongan	2012	116500	653982	5738100000	6.15
26	kab pekalongan	2013	116500	666020	9243350000	6.37
26	kab pekalongan	2014	109300	982327	6328720000	6.53
26	kab pekalongan	2015	112100	1033501	4850200000	6.55
27	kab pemalang	2011	261200	570013	30513221000	5.19
27	kab pemalang	2012	241700	599305	12948250000	5.51
27	kab pemalang	2013	246800	644200	15584850000	5.72
27	kab pemalang	2014	237000	920712	23640515000	5.87
27	kab pemalang	2015	235500	995662	2120250000	6.04
28	kab tegal	2011	161100	562626	28790307000	5.71
28	kab tegal	2012	149000	592488	9586949000	5.78
28	kab tegal	2013	149800	587707	9606650000	5.85
28	kab tegal	2014	140300	846382	16178667000	5.93
28	kab tegal	2015	143500	943242	23708800000	6.3
29	kab brebes	2011	394400	541295	64564505000	5.24
29	kab brebes	2012	364900	559324	29151390000	5.38
29	kab brebes	2013	367900	564426	11227947000	5.68
29	kab brebes	2014	355100	840619	16849270000	5.86
29	kab brebes	2015	352000	951354	22769678000	5.88
30	kota magelang	2011	13100	615611	6769465000	10.14
30	kota magelang	2012	12100	630603	1592110000	10.2
30	kota magelang	2013	11800	610731	3431286000	10.22
30	kota magelang	2014	11000	876807	2885585000	10.27
30	kota magelang	2015	10900	996954	891850000	10.28
31	kota Surakarta	2011	64500	682966	5891911000	10.05
31	kota Surakarta	2012	59700	694616	91500000	10.11
31	kota Surakarta	2013	59700	679401	197933000	10.25

31	kota Surakarta	2014	55900	979973	57000000	10.33
31	kota Surakarta	2015	55700	1020112	1671875000	10.36
32	kota salatiga	2011	13300	675857	6825816000	8.97
32	kota salatiga	2012	12300	693702	498857000	9.09
32	kota salatiga	2013	11500	696212	1234885000	9.2
32	kota salatiga	2014	10800	1005327	668360000	9.37
32	kota salatiga	2015	10600	1077709	5411950000	9.81
33	kota semarang	2011	88500	750564	10534163500	9.8
33	kota semarang	2012	81900	738328	7485437000	9.92
33	kota semarang	2013	86700	832198	2731600000	10.06
33	kota semarang	2014	84700	1198939	6301500000	10.19
33	kota semarang	2015	84300	1383756	2277000000	10.2
34	kota pekalongan	2011	28300	656349	3271660000	7.72
34	kota pekalongan	2012	26800	700759	686300000	7.8
34	kota pekalongan	2013	24100	714078	10135246000	7.96
34	kota pekalongan	2014	23600	1025799	13457324000	8.12
34	kota pekalongan	2015	24100	1098723	35076600000	8.28
35	kota tegal	2011	25900	564386	28330157000	7.66
35	kota tegal	2012	24000	592135	14065400000	7.85
35	kota tegal	2013	21600	605421	17947008000	8.05
35	kota tegal	2014	20900	909963	14276409000	8.26
35	kota tegal	2015	20300	1011236	690874460	8.27

RIWAYAT HIDUP



Zania Ulfah Satari, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Djakaria dan Mulyani Rahayu. Lahir di Jakarta, 27 Juli 1995. Bertempat tinggal di Jln. Swadaya III No.48 Rt 04/Rw 06, Jatiranggon, Jatisampurna, Bekasi.

Riwayat Pendidikan : Penulis memulai pendidikan di Taman kanak kanak Al-Barqah, melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidayah Al-Ikhlas (lulus tahun 2006) dan SDN Kelapa Gading Barat 02 Petang (lulus tahun 2007), SMPN 30 Jakarta (lulus tahun 2010), SMAN 13 Jakarta (lulus tahun 2013) dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta dengan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Ekonomi Koperasi pada tahun 2013.

Pengalaman Kerja : Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada bulan Januari-Februari 2016. Praktik Kegiatan Mengajar (PKM) di SMA 113 Jakarta pada bulan Agustus-Desember 2016. Tenaga lepas di Koperasi Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Januari-Maret 2017. Staff Keuangan di LTN-PBNU pada bulan April 2017-sekarang.

Jika ada yang ingin memberikan saran, masukan dan bertanya dapat diajukan melalui email : zaniaulfah@gmail.com